

# Hukum Islam di Indonesia

## (Studi Pengembangan Materi)



Dr. H. Supardin, M.H.I

# **HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**(Studi Pengembangan Materi)**

**DR. H. Supardin, M.H.I.**

Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi  
buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

**Hukum Islam di Indonesia (Studi Pengembangan Materi)**

Penulis:

**DR. H. Supardin, M.H.I.**

Editor:

Dra. Hj. Wahida Rahim, M.M

Penyelaras Akhir:

Taufiq Mathar

Cetakan I: 2020

v + 178 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-328-385-9

**Alauddin University Press**

UPT Perpustakaan UIN Alauddin

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong,

Samata, Kabupaten Gowa

Website: <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>

## PENGANTAR REKTOR

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur hanya kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis dan keluarga sehingga dapat menulis dan menyusun buku ini dengan baik, dengan judul: HUKUM ISLAM DI INDONESIA: Studi Pengembangan Materi. Demikian pula salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhammad saw. sebagai suri teladan bagi segenap manusia dan menjadi rahmat dan penerang bagi semesta alam.

Upaya penguatan dan pengembangan akademik pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, rektor dalam menjalankan roda universitas telah mencanangkan lima pancacita: prodi yang handal, moderasi beragama yang mengakar, jejaring yang kuat, publikasi yang aktif, dan data yang terintegrasi. Pancacita yang keempat merupakan publikasi yang aktif sehingga rektor mencanangkan setiap tahun program 100 judul buku, dan salah satu di antaranya adalah buku ini Hukum Islam di Indonesia yang merupakan Studi Pengembangan Materi Hukum Islam di Indonesia yang ditulis oleh Saudara Dr. H. Supardin, M.H.I.

Oleh karena itu rektor mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada penulis atas terbitnya buku ini yang dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penulis lain terhadap Hukum Islam di Indonesia. Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mendalami tentang pengembangan Materi Hukum Islam di Indonesia. Tentunya buku ini sangat berguna bagi mahasiswa khususnya mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dan terkhusus lagi bagi mahasiswa pada Prodi Hukum Keluarga Islam.

Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk menambah wawasan mahasiswa dan pembacanya terkait dengan studi pengembangan materi hukum Islam di Indonesia. UIN Alauddin Makassar sebagai

salah satu lembaga pendidikan tinggi yang selalu mengembangkan tri dharma perguruan tinggi terutama di bidang penelitian sehingga dapat menerbitkan 100 judul buku setiap tahun sebagai salah satu wujud pancacita rektor.

Akhirnya, rektor menyampaikan terima kasih kepada penulis dan kepada segenap pihak yang telah memberikan sumbangsinya sehingga buku ini dapat diterbitkan dengan baik. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi pada UIN Alauddin Makassar khususnya kepada mahasiswa yang menekuni hukum Islam dalam strata pendidikan formal, baik tingkat sarjana, magister, maupun doktor. Semoga Allah swt. meridainya dan menjadikan amal jariah khususnya kepada penulis buku ini, اللهم آمين.

Makassar, 31 Mei 2021 M /  
19 Syawal 1442 H  
Rektor,

Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D.

## PENGANTAR PENULIS

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Ucapan Puji dan syukur hanya kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis dan keluarga sehingga dapat menulis dan menyusun buku ini dengan baik, dengan judul: HUKUM ISLAM DI INDONESIA: Studi Pengembangan Materi. Demikian pula salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhamma saw. sebagai suri teladan bagi segenap manusia dan menjadi rahmat dan penerang bagi semesta alam raya ini.

Upaya dalam penulisan dan penyusunan buku ini, tentunya banyak pihak yang membantu sehingga dapat diterbitkan, karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam penyusunan dan penerbitannya.

Buku ini memaparkan Hukum Islam di Indonesia yang menguraikan tentang penerapan dan pengembangan materi hukum Islam di Indonesia. Penulis menyadari bahwa kelemahan dan kekeliruan jika terdapat di dalamnya, dimohon kepada para pembaca untuk mengkritik dan masukan demi kesempurnaan yang lebih baik kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah jualah yang memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang meluangkan tenaga, pikiran, dan waktunya pada penulisan dan penyusunan hingga penerbitan buku ini selesai, dan semoga bermanfaat, *āmīn yā Rab al-'ālamīn*.

Wassalam.

Penulis

**Dr. H. Supardin, M.H.I.**

# DAFTAR ISI

PENGANTAR REKTOR.....	i
PENGANTAR PENULIS .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Hukum Islam dan Peradilan .....	9
C. Kajian Pustaka.....	10
D. Penggunaan Metode .....	13
E. Tujuan dan Kegunaan .....	15
<b>BAB II.....</b>	<b>16</b>
<b>ISTILAH PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....</b>	<b>16</b>
A. Istilah Syari'ah .....	17
B. Istilah Fikih .....	19
C. Istilah Hukum Islam.....	20
D. Istilah Produk Pemikiran Fikih .....	22
E. Istilah Produk Pemikiran Fatwa Ulama .....	24
F. Produk Pemikiran Yurisprudensi .....	24
G. Produk Pemikiran Perundang-Undangan.....	25
H. Istilah Produk Pemikiran Teori Sosiologi Hukum .....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>HUKUM ISLAM DALAM LINTAS SEJARAH.....</b>	<b>35</b>
A. Masa Kesultanan.....	40
B. Masa Penjajahan .....	41
C. Masa Kemerdekaan .....	43
<b>BAB IV.....</b>	<b>54</b>
<b>HUKUM ISLAM DAN PENGEMBANGANNYA .....</b>	<b>54</b>
A. Sumber Hukum Islam di Indonesia .....	55

B. Produk Hukum Nasional dalam KHI .....	62
C. Pengembangan Kompetensi Peradilan Agama .....	73
<b>BAB V .....</b>	<b>157</b>
<b>P E N U T U P .....</b>	<b>157</b>
A. Kesimpulan .....	157
B. Implikasi .....	159
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>167</b>
<b>INDEKS.....</b>	<b>170</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

**M**akhluk yang bernama manusia diciptakan oleh Allah ke permukaan bumi sebagai pengatur, pemakai, dan penikmat apa yang sesungguhnya diharapkan oleh manusia itu sendiri. Karena itu Allah swt. menurunkan al-Qur'an kepada makhluk-Nya (manusia) untuk dijadikan sebagai sumber pokok ajaran Islam. Manusia sebagai khalifah di muka bumi diberikan amanah untuk mengelola, memelihara, dan mengatur hubungan pada perikehidupan, baik hubungan vertikal maupun horizontal. Hubungan vertikal adalah mengatur tata cara mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, dan hubungan horizontal adalah mengatur bagaimana mengadakan komunikasi dan menata berbagai aspek kehidupan di dunia dengan baik antar sesama makhluk. Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, ada laki-laki dan ada perempuan. Demikian pula dengan bahasa dan budaya yang bermacam-macam, termasuk di antaranya perbedaan syari'at dan hukum atau

peraturan yang berlaku pada suatu negara, daerah, dan masyarakat.

Kemampuan untuk mengatur berbagai perikehidupan manusia, diperlukan suatu peraturan yang dibuat, disepakati, dan ditaati oleh manusia itu juga. Peraturan-peraturan yang dibuat itu, umumnya dipahami dan diartikan sebagai hukum atau undang-undang. Undang-undang pada suatu negara atau tempat selalu berubah dari generasi ke generasi lainnya, baik secara teoretis maupun secara empiris yang terjadi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebuah perubahan terjadi karena para ahli hukum yang saling berbeda pendapat, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pengetahuan hukum pun tidak dapat diabaikan, karena sering terjadi kasus perbuatan atau pelanggaran hukum. Hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia lahir dijempit oleh hukum, manusia hidup diatur oleh hukum, dan manusia mati diantar oleh hukum. Oleh karena itu, manusia perlu mempelajari sejarah sosial hukum, baik hukum publik maupun hukum privat terutama sejarah sosial hukum Islam, hukum-hukum lain yang terkait dengan kebutuhan keseharian.

Menelusuri sejarah sosial hukum Islam berarti mempelajari hukum itu sendiri. Hukum Islam telah berkembang secara kompleks sehingga melahirkan ulama dan cendekiawan muslim dengan karya tulisnya yang dijadikan sebagai khazanah yang tidak bisa dinilai dengan material. Oleh karena itu, tulisan ini hanya sebagian kecil dari khazanah sejarah sosial hukum Islam di tanah air, khususnya pelaksanaannya yang merupakan ciri khas keindonesiaan dan mengandung muatan lokal termasuk kedaerahan.

Arah dan maksud istilah hukum Islam tersebut adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum *amali* berupa interaksi sesama manusia, selain

jinayat (pidana Islam).<sup>1</sup> Segala ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni (*mahdah*) tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam. Yang termasuk adalah hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama. Akan tetapi, jika rancangan undang-undang hukum pidana yang sedang digodok di DPR disahkan menjadi undang-undang, maka hukum pidana itu juga termasuk hukum Islam sebagai produk hukum.

Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mengimplementasikan dan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, damai, dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, maka diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat secara umum tanpa kecuali.

Pencapaian dalam sebuah keadilan, diperlukan suatu peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Peradilan Agama yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Peradilan Agama kini diatur dengan undang-undang baru yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Februari 2006.<sup>2</sup> Undang-undang tersebut merupakan angin segar bagi lembaga Peradilan Agama di Indonesia, karena memuat aspek-aspek lain termasuk ekonomi syari'ah. Pada undang-undang lama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) dijelaskan, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai

---

<sup>1</sup>Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53.

<sup>2</sup>Lihat Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 20.

perkara perdata tertentu.<sup>3</sup> Tetapi dalam revisi atau amandemen undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>4</sup> Perubahan dalam pasal tersebut adalah pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi pelaku kekuasaan kehakiman, dan perkara perdata tertentu menjadi perkara tertentu, hilang kata perdata. Kemudian pada perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal ini berubah menjadi pasal 1, yakni: dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam; Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama, dan dalam ayat (8) Pengadilan Khusus adalah pengadilan yangn mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Pelaku berarti subjek utama dalam bertindak, sedangkan pelaksana berarti subjek pengganti dalam melakukan perbuatan hukum. Demikian halnya, perkara perdata tertentu bermakna perkara perdata saja, sedangkan perkara tertentu bermakna luas, dapat bermakna perkara perdata dan perkara pidana. Karena itu, perubahan materi hukum Islam dalam perundang-undangan mengalami tahap-tahap perkembangan dari zaman ke zaman.

Secara umum para penulis sejarah hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam ke dalam lima masa:

---

<sup>3</sup>Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Peradilan Agama*, pasal 2. Lihat pula H. Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar* (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), h. 3.

<sup>4</sup>Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, pasal 2.

- 1) Masa Nabi Muhammad saw. (610 M sampai 632 M).
- 2) Masa khulafaurrasyidun (632 M sampai 662 M).
- 3) Masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan (abad VII sampai X M).
- 4) Masa kelesuan pemikiran (abad X M-XIX M).
- 5) Masa kebangkitan kembali (abad XIX M sampai sekarang).<sup>5</sup>

Sumber lain menyatakan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, melalui enam periode:

- 1) Periode Rasulullah saw.
- 2) Periode Khulafaurrasyidun.
- 3) Periode setelah khulafaurrasyidun sampai awal abad II H.
- 4) Periode awal abad II H sampai pertengahan abad IV H.
- 5) Periode pertengahan abad IV H sampai jatuhnya kota Bagdad.
- 6) Periode jatuhnya kota Bagdad sampai sekarang.<sup>6</sup>

Pembagian dua kurun waktu tersebut, secara substansi adalah sama, karena sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam diawali dari masa Nabi Muhammad saw. sampai sekarang, termasuk di Indonesia.

Latar belakang sejarah sosial hukum Islam yang perlu diketahui untuk perkembangan hukum Islam, juga sistem hukum. Di dunia hukum internasional, ada lima sistem hukum yang masih hidup (*living law*). Kelima sistem hukum tersebut adalah: (a) sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yakni hukum tertulis atau undang-undang diberlakukan di negara-negara seperti Perancis, Jerman, Belanda, Indonesia; (b) sistem hukum Anglo Saxon (*common law*) yakni selain hukum tertulis juga konvensi

---

<sup>5</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam (Cet. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 139.

<sup>6</sup>Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* diterjemahkan oleh Dedi Junaedi dan Hamidah dengan judul *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1996), h. 11-12.

diberlakukan di negara-negara seperti Amerika, Inggris; (c) sistem hukum Sosialis Komunis yakni hukum diktator seperti negara Rusia, Cina; (d) sistem hukum Adat (*adattrecht*) yakni hukum kebiasaan seperti negara Jepang, Indonesia; dan (e) sistem hukum Islam seperti negara Indonesia dan beberapa negara Islam di benua Asia khususnya bangsa-bangsa melayu.

Sistem kelima hukum tersebut menggambarkan bahwa sistem hukum di dunia adalah pluralis. Sistem hukum yang pluralis ini tidak hanya di belahan dunia Barat, tetapi juga terjadi di dalam satu negara muslim atau negara yang berpenduduk mayoritas muslim, termasuk negara Republik Indonesia. Dengan sistem hukum yang pluralis inilah melahirkan materi hukum, sehingga masyarakat Indonesia khususnya ilmuwan diharuskan untuk dapat memacu diri dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Perkembangan sistem hukum Nasional di Indonesia bersumber dari sistem hukum adat, sistem hukum Barat, dan sistem hukum Islam. Kalau dilihat dan diteliti dengan cermat, sistem hukum Islamlah yang banyak mengalami perkembangan dengan pesat.

Implikasi perkembangan sejarah hukum, maka sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk. Kemajemukan itu merupakan corak dari sistem hukum yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Barat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut diakui di dalam lembaran Negara Republik Indonesia, karena masih dipatuhi masyarakat Indonesia menurut sistem hukum yang berlaku pada suatu daerah atau penganut agama. Diakui oleh konstitusi dan diatur dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Spesialisasi pengembangan hukum Islam di Indonesia sangat konstitusional karena dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang termaktub dalam pasal 29:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>7</sup>

Suatu hal yang mendapat perhatian pada pasal 29 tersebut, yakni rumusannya tidak pernah diubah walaupun Undang-Undang Dasar 1945 sudah empat kali diamandemen yakni tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Tafsiran ilmiahnya yang terkandung dalam pasal tersebut antara lain:<sup>8</sup>

1. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam atau kaidah-kaidah agama lain yang diakui di negara republik ini.
2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, demikian halnya dengan pemeluk agama lain wajib menjalankan menurut ajaran agamanya.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Tuhan menurut keyakinan agamanya.

Kedua ayat dari pasal 29 UUD 1945 tersebut dapat dipahami bahwa pemberlakuan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia adalah berdasarkan konstitusi. Atas dasar konstitusi tersebut, materi pengembangan materi hukum Islam di Indonesia dapat dianalisis berdasarkan teori-teori hukum.

Atas dasar konstitusi tersebut, hukum Islam untuk pemberlakuan dan pengembangannya juga didasari atas formal yuridis, alasan sejarah, dan tuntutan masyarakat atau sosiologi hukum dari berbagai daerah di tanah air. Hukum Islam merupakan istilah yang dikembangkan dan telah dibakukan di Indonesia, ia merupakan peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* (Pasal 29 tidak diamandemen).

<sup>8</sup>Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 3.



diformulasikan ke dalam produk-produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut adalah fikih, fatwa ulama, yurisprudensi, undang-undang, dan juga dikembangkan dengan produk sosiologi hukum.

Berdasarkan dari konstitusi/formal yuridis, sejarah, dan konvensi masyarakat Indonesia, maka materi pengembangan hukum khususnya materi hukum Islam di Indonesia dapat diterapkan secara berkesinambungan. Hal ini dapat diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia karena pengembangannya ke depan yang lebih mengarah kepada pelaksanaan syari'at Islam. Pemberlakuan syari'at Islam ini, telah docontohkan dengan penerapan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta munculnya gagasan pemberlakuan syariat Islam dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

Pembentukan hukum Islam di tanah air telah dikembangkan setelah melalui lintas sejarah yang panjang, terutama pada fase kesultanan, zaman penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang, kemudian pada masa kemerdekaan yang diisi ke dalam dua orde yang disebut dengan orde lama dan orde baru. Kemudian pengembangannya lebih meluas dan mengikat di era reformasi yang didasari oleh penyatuan atap lembaga-lembaga peradilan pada Mahkamah Agung.

Hukum Islam dalam sejarahnya di Indonesia, pengembangan studi materi hukum Islam itu tidak hanya pada perkawinan, kewarisan, dan wakaf, tetapi kini sedang memasuki materi yang lebih luas termasuk ekonomi syari'ah yang meliputi 11 (sebelas)<sup>9</sup> aspek bisnis yang diatur berdasarkan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>9</sup>Ekonomi syari'ah yang dimaksudkan adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, yang meliputi: bank syari'ah; lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada penjelasan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, pasal 49, huruf i.

Buku ini adalah mencakup tentang pengembangan materi hukum Islam di Indonesia yang berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut diimplementasikan dengan undang-undang. Untuk lebih memfokuskan substansi pada materi hukum Islam yang dibahas dalam buku ini, maka penulis membatasi tulisan pada pengertian yang berkenaan dengan hukum Islam di Indonesia; tinjauan umum hukum Islam dalam arti syari'ah, fikih, dan hukum Islam dalam berbagai produk pemikiran hukum; hukum Islam dalam lintas sejarah; dan studi analisis terhadap eksistensi hukum Islam di Indonesia.

## **B. Hukum Islam dan Peradilan**

Buku ini membahas tentang hukum Islam di Indonesia dalam studi pengembangan materi termasuk perkara-perkara tertentu. Secara umum dijelaskan bahwa materinya memberi pengertian tentang gambaran pengembangan hukum Islam terutama materi hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia. Materi hukum Islam tersebut diwujudkan dalam suatu hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sejak fase kesultanan, zaman penjajahan, masa kemerdekaan, hingga era reformasi saat ini. Pengembangan materi hukum Islam tidak saja menyangkut perkawinan, kewarisan, hibah, dan perwakafan, tetapi dikembangkan pada materi hukum lain seperti ekonomi syari'ah. Materi ekonomi syari'ah antara lain meliputi perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, dan lain-lain. Hal inilah menjadi kewenangan Peradilan Agama kini dan masa akan datang.

Bagi masyarakat atau warga negara Indonesia telah mengenal istilah hukum Islam yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).<sup>10</sup> Hukum Islam yang dimaksudkan dalam buku ini adalah peraturan-

---

<sup>10</sup>Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53.

peraturan yang bersumber dari wahyu dan diformulasikan ke dalam produk pemikiran hukum terutama undang-undang, khususnya yang menyangkut: (1) hukum perkawinan; (2) hukum kewarisan, wasiat, dan hibah; (3) hukum perwakafan dan shadaqah; dan (4) ekonomi syari'ah. Dari materi tersebut, ekonomi syari'ah yang mendapat prioritas dalam pengembangan hukum Islam.

Sejarah perkembangan lembaga Peradilan Agama semakin kompleks terutama pada pengembangan materi hukum Islam. Hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa sekarang lembaga-lembaga perekonomian Islam juga telah diatur dalam lingkungan dan kewenangan di Pengadilan Agama.

Berbagai literatur tentang materi hukum Islam, dapat dihimpun bahwa yang dimaksudkan dalam buku ini adalah menelusuri perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama yang menyangkut pengembangan materi hukum Islam di Indonesia. Kemudian dalam pengembangan materi hukum Islam yang dimaksudkan tersebut adalah hasil pemikiran yang dihasilkan oleh produk hukum Islam di Indonesia yang telah diakui sebagai aturan-aturan yang diyakini kebenarannya.

### **C. Kajian Pustaka**

Usaha penulis dalam menelusuri dan membaca berbagai buku pustaka, dan berkonsultasi dengan pihak akademik dan beberapa praktisi, penulis tidak menjumpai pembahasan tentang “materi pengembangan materi hukum Islam di Indonesia”. Yang ada ialah pembahasan tentang hukum Islam di Indonesia dengan berbagai aspek.

Kajian tentang sejarah sosial hukum Islam mulai dirintis di Program Pascasarjan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1992. Namun sebelumnya telah ditulis oleh T.M. Hasbi ash-Shiddieqy berjudul *Pengantar Ilmu Fikih*. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dikenal sebagai tokoh ahli dalam hukum Islam, menguraikan tentang sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia hingga mencapai puncak kejayaannya. Perkembangan hukum Islam

dalam bidang muamalah, kekeluargaan, jinayat, siyasah, bahkan hukum internasional, dan semacamnya selalu mengalami perubahan, tergantung adat-istiadat keadaan sosial kemasyarakatan. Materi yang tidak mengalami perubahan secara signifikan adalah menyangkut masalah ibadah.

Studi Abdul Wahhab Khallaf dalam *Perkembangan Sejarah Hukum Islam* yang dialihbahasakan oleh Ahyar Aminuddin, bahwa pada tahun 1936 Masehi, pemerintah membentuk lembaga yang beranggotakan ulama dan ahli hukum positif untuk membuat undang-undang yang mengatur berbagai hukum keluarga. Pendapat dirangkum dari berbagai mazhab dengan isyarat supaya tidak terikat dengan satu pendapat mazhab yang disesuaikan dengan kemaslahatan dan perkembangan kehidupan sosial.

Pendapat Muhammad Daud Ali terhadap *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia* berkesimpulan bahwa kini di Indonesia hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Republik Indonesia wajib mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang diberlakukan bagi umat Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat. Oleh karenanya, hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional di samping hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Amir Mu'alim dan Yusdani dalam buku *Materi Pemikiran Hukum Islam* menguraikan kecenderungan hukum di dunia muslim dewasa ini terbagi tiga sistem. *Pertama*, mempertahankan berlakunya hukum Islam secara utuh; *kedua*, mengganti hukum Islam dengan hukum sekuler; dan *ketiga*, mengkompromikan kedua sistem hukum tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hukum Islam juga dipahami sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai pranata sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat terutama masyarakat muslim, bukan merupakan bagian sambilan dari kehidupan

manusia, melainkan kebutuhan yang harus diketahui oleh masyarakat pencari keadilan.

Pendapat Juhaya S. Praja dalam bukunya tentang *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* menyimpulkan bahwa makna hukum Islam itu bukan sebagai kode melainkan sebagai mode. Artinya umat Islam senantiasa berpedoman kepada sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan hadis. Untuk menjalankan hukum Islam tidak perlu diperintahkan secara formal berdasarkan undang-undang, tetapi melaksanakan dengan kesadaran yang ikhlas dan bertanggung jawab. Hukum yang akan ditegakkan itu bukan berdasarkan hukum tertulis walaupun tidak diabaikan, melainkan hukum berdasarkan nilai moral dan akhlak yang mulia. Karena itu, K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, menguraikan tentang *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, bahwa membicarakan hukum Islam di Indonesia tidak boleh diabaikan dengan lembaga Peradilan Agama. Telah disadari bahwa hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam masyarakat Indonesia telah mengakar dan kuat, sehingga pengembangan ke depan akan lebih terbuka.

Studi Ahmad Rofiq dalam bukunya mengenai *Hukum Islam di Indonesia* membahas tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Demikian juga sumber lain umumnya membahas tentang ketiga hukum tersebut, yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Sehubungan dengan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pembahasan dalam buku ini adalah berbeda dengan kajian-kajian di atas, dan secara khusus pembahasan dalam buku ini belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, buku ini merupakan hasil buku yang sangat perlu untuk dihasilkan dan diterbitkan sebagai karya tulis ilmiah tentang hukum Islam di Indonesia. Materi karya tulis ini mungkin mempunyai kaitan dengan karya tulis lain, tetapi substansi dan objeknya mempunyai perbedaan yang mendasar. Setiap penelitian mempunyai hasil yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Atas dasar itulah sehingga penulis berkreasi dan berusaha semaksimal

mungkin untuk menghasilkan karya tulis ini dalam bentuk buku sebagai sebuah referensi karya tulis ilmiah.

#### **D. Penggunaan Metode**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam buku ini sebagai adalah berikut:

##### *1) Metode Pelaksanaan*

Penggunaan metode ini, penulis melaksanakan buku dengan menggunakan metode komparatif yakni dengan membandingkan beberapa pendapat dari berbagai literatur yang berkenaan dengan objek buku. Objek buku yang dimaksudkan adalah perkembangan materi hukum Islam di Indonesia. Materi hukum Islam itu adalah menyangkut hukum keluarga, baik yang menyangkut hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan, maupun hukum keluarga lainnya. Tetapi objek buku utama adalah pada tiga buku yang dikenal dengan istilah buku I, buku II, dan buku III. Buku I membahas perkawinan, buku II membahas kewarisan, dan buku III membahas tentang perwakafan. Kemudian dalam pengembangan materi hukum Islam telah disahkan dan diberlakukan pada lembaga Peradilan Agama yakni menyangkut ekonomi syari'ah yang mencakup dalam berbagai aspek kehidupan umat muslim di Indonesia.

##### *2) Metode Pendekatan*

Pendekatan metode ini, penulis menggunakan pendekatan multi interdisipliner. Metode pendekatan ini bersifat normatif sosiologis, bersifat formal yuridis, dan konteks sejarah konstitusional. Pendekatan yang bersifat normatif sosiologis adalah bagian dari hukum Islam yang pengembangan dan pelaksanaannya tergantung kesadaran masyarakat, karena hanya mempunyai sanksi moral bila melanggar. Pendekatan yang bersifat formal yuridis, adalah bagian dari hukum Islam yang telah menjadi hukum positif atas dasar peraturan yang telah mendapat legitimasi hukum atau telah diundangkan. Adapun pendekatan dalam konteks sejarah konstitusional, adalah pemberlakuan hukum Islam di Indonesia melalui perjuangan legal sejak Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga dan keempat hingga dewasa ini. Inti dari alinea ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kalimat yang menyertakan keimanan sebagai lambang hukum Islam yakni “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...” dan kalimat pada alinea keempat adalah “... berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...”.

### 3) Metode Pengumpulan Literatur

Metode mengumpulkan data dalam buku ini, penulis menggunakan buku kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan objek buku ini yakni yang terkait dengan hukum Islam di Indonesia khususnya studi pengembangan materi hukum Islam di Indonesia sebagai kajian pokok. Literatur primer yang digunakan oleh penulis adalah: 1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama (diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989); 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991); dan 3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama (diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006). Literatur sekunder dan atau penunjang adalah buku-buku hukum dan/atau kamus-kamus yang terkait dengan hukum Islam terutama yang menyangkut materi pengembangan materi hukum Islam di Indonesia.

### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Proses dalam mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis dan menginterpretasi data. Dalam teknik analisis data untuk memperoleh kualifikasinya, penulis juga menggunakan teknik interpretasi dengan cara berfikir deduktif dan juga induktif. Metode ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis data, terutama pendapat tentang pengembangan materi hukum Islam di Indonesia.

Studi dalam menganalisis data terkadang penulis mendahulukan metode deduktif daripada metode induktif, demikian juga sebaliknya, tergantung objek pembahasan. Kalau objek pembahasan mengarah kepada kekhususan maka penulis menggunakan metode induktif, dan kalau objeknya mengarah ke umum maka digunakan metode deduktif.

## **E. Tujuan dan Kegunaan**

Studi dalam meneliti sesuatu objek, perlu diketahui apa tujuan dan kegunaannya. Adapun tujuan dan kegunaan dalam buku ini adalah:

### **1) Tujuan**

Segala sesuatu yang diusahakan pasti mempunyai tujuan. Tanpa tujuan, arahnya akan mengalami gangguan dan sulit untuk dikendalikan. Karena itu, buku ini bertujuan untuk menghasilkan suatu materi hukum Islam dalam pengembangan dan pelaksanaannya di Indonesia, terutama dalam hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan, serta ekonomi syari'ah.

### **2) Kegunaan**

Studi buku ini mempunyai kegunaan teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang bergelut di dunia akademik, juga untuk menjadi bahan pertimbangan sekaligus rujukan dalam materi hukum Islam di Indonesia. Selain itu juga kegunaan secara praktis yakni diharapkan agar bermanfaat bagi masyarakat luas yang senantiasa belajar dan mencari materi hukum Islam untuk dikembangkan dalam masyarakat di Indonesia. Terkait kegunaan secara spesifik, buku ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atau referensi dan selanjutnya berguna untuk pengembangan materi hukum Islam di Indonesia terkhusus pada jurusan/konsentrasi hukum Islam dan/atau konsentrasi syari'ah.



## BAB II

# ISTILAH PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA



**H**ukum Islam mempunyai beberapa sinonim yang meliputi tentang tinjauan syari'ah, fikih, dan tinjauan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dari segi materinya adalah meliputi produk pemikiran fikih, produk pemikiran fatwa ulama, produk pemikiran yurisprudensi, dan produk pemikiran perundang-undangan (semua ini merupakan produk dari hasil pemikiran/ijtihad ulama). Adapun produk-produk pemikiran hukum Islam tersebut yang merupakan hasil ijtihad ulama dan cendekia muslim yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap hukum Islam. Produk pemikiran tersebut penulis menemukan bahwa produk pemikiran sosiologi hukum ini juga merupakan produk pemikiran pengembangan hukum masyarakat secara umum, termasuk masyarakat muslim.

## A. Istilah Syari'ah

Istilah syari'ah menurut bahasa mempunyai arti yang banyak. Dalam *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, syari'ah berarti syari'at, sunnah, hukum, peraturan,<sup>11</sup> karena itu induk dari fikih adalah syari'ah. Dalam bahasa Indonesia, syari'ah disamakan dengan syari'at yang artinya isi hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan al-Qur'an dan hadis.<sup>12</sup> Syari'ah dalam pengertian tersebut secara umum berarti peraturan yang menyangkut kehidupan manusia di dunia dan akhirat, sebab syari'ah bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Pengertian lain secara leksikal, syari'ah berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air di sungai.<sup>13</sup> Pengertian inilah yang banyak digunakan oleh mahasiswa dalam pemahaman syari'ah.

Menurut pakar hukum Islam mendefinisikan bahwa syari'ah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak.<sup>14</sup> Karena syari'ah merupakan penyebab kehidupan manusia, maka syari'ah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah manusia dan alam lainnya.

Hukum *syara'* menurut ulama *uṣūl* ialah doktrin (kitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqir*). Sedangkan menurut ulama *fiqh* hukum *syara* ialah efek yang dikehendaki oleh kitab *syari'* dalam perbuatan seperti wajib,

<sup>11</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Ditelaah dan Dikoreksi oleh K.H. Ali Ma'shum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progrssif, 1997), h. 711.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kemendikbudristek), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1115.

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 2.

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 3.

haram, dan mubah.<sup>15</sup> Syariat atau syari'ah menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Pengistilahan lain, menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Sedangkan menurut Muhammad 'Ali at-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyāf Iṣṭilāhāt al-Funun* memberikan pengertian syari'ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). Syari'ah disebut juga *syara'*, *millah* dan *dīn*.<sup>16</sup> Syari'ah atau syariat diidentikkan dengan hukum Islam yang berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi ilmu akidah (keimanan), ilmu fiqhi (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), dan ilmu akhlak (kesusilaan) atau pergaulan.

Awal mulanya syari'ah diartikan sebagai agama, namun kemudian syari'ah diartikan dan berfungsi sebagai hukum untuk mengatur hukum amaliyah. Perbedaan antara agama dan syari'ah itu hampir tidak dapat dipisahkan. Tetapi kalau dilihat dari segi penggunaannya, maka perbedaannya cukup jelas. Kalau agama dapat diberlakukan secara universal atau umum, sedangkan syari'ah hanya berlaku secara khusus yakni bagi umat tertentu yang kemungkinannya berbeda dengan umat sebelumnya. Karenanya pengertian syari'ah lebih khusus daripada agama.

---

<sup>15</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h.154.

<sup>16</sup>Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), h. 1.

Syari'ah merupakan hukum amaliah yang dibawa oleh para rasul dan tentunya setiap rasul berbeda ajaran yang disampaikan kepada umatnya. Syari'ah senantiasa dipengaruhi oleh waktu dan tempat tergantung rasul yang membawanya. Sehingga syari'ah yang dibawa oleh rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad Saw. berbeda tetapi melanjutkan dan menyempurnakannya syari'ah sebelumnya.

Sedangkan agama dapat diartikan secara universal yang inti dasarnya adalah tauhid yang tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat serta situasi dan kondisi apapun. Yang namanya tauhid adalah meng-Esa-kan Allah, dan inti dari ajaran agama adalah tauhid.

## B. Istilah Fikih

Istilah fikih/*fiqh* (فقه) dalam *Kamus Al-Munawwir*, *fiqh* (فقه) berarti mengerti, memahami,<sup>17</sup> dan secara sederhana menurut bahasa, fikih bermakna tahu dan paham. Menurut istilah fikih diartikan sama dengan agama yang disyari'atkan Allah untuk para hamba yang melengkapi hukum-hukum agama yang berpautan dengan perkataan, perbuatan, perikatan, dan lain-lain. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, fikih diartikan sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafsīlī* yakni dalil-dalil tentang hukum-hukum yang khusus yang diambil daripadanya dengan jalan ijtihad.<sup>18</sup> Pada sumber lain, fikih menurut pengertian istilah kebanyakan fuqaha ialah “segala hukum syara' yang diambil dari Kitab Allah swt. dan Sunnah Rasulullah saw. dengan jalan mendalami faham dan penilikan, yakni dengan jalan ijtihad dan istinbat.<sup>19</sup> Fikih merupakan ilmu dasar untuk memahami ajaran Islam termasuk hukum Islam yang dipahami dan diberlakukan di Indonesia. Kalau sudah mengetahui

<sup>17</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, op. cit. h. 1067.

<sup>18</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih* (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 17.

<sup>19</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 19.

fikih berarti mengurangi perdebatan tentang masalah khilafiah, artinya toleransi dalam khilafiah dijunjung tinggi.

Pendapat Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, kata fikih atau *fiqh* (فقه) berarti paham yang mendalam. Bila paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin.<sup>20</sup> Fikih tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kedalamannya sesuatu itu. Orang yang mengetahui fikih berarti melaksanakan hukum Islam dengan keyakinan yang mendalam. Sehingga dalam berbuat dan bermuamalah termasuk dalam beribadah tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh di sekitarnya. Pengetahuan yang dihasilkan dari fikih dapat menuntun manusia untuk berbuat dalam tataran hukum Islam yang diberlakukan.

### C. Istilah Hukum Islam

Istilah hukum Islam ditinjau dari produk pemikiran hukum Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa istilah, paling tidak dibagi ke dalam lima produk hukum, yaitu: pertama, produk pemikiran fikih. Kedua, produk pemikiran fatwa ulama. Ketiga, produk pemikiran yurisprudensi. Keempat, produk pemikiran perundang-undangan. Kelima, produk pemikiran teori sosiologi hukum.

Maksud dari istilah hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).<sup>21</sup> Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk digunakan dalam pidana Islam, yang juga akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam, baik secara daerah atau lokal maupun secara nasional.

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ibadah murni (*maḥḍah*) tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam di Indonesia. Yang termasuk adalah hukum perdata Islam tertentu

---

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 5.

<sup>21</sup>Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53.

yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama. Akan tetapi, jika rancangan undang-undang hukum pidana yang sedang digodok di DPR disahkan menjadi undang-undang, maka hukum pidana itu juga termasuk hukum Islam.

Istilah hukum Islam dalam *Kamus Hukum* dinyatakan, bahwa hukum Islam (Indonesia) atau hukum *syara'* ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an.<sup>22</sup> Demikian halnya dalam bahasa Indonesia yang dinyatakan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis.<sup>23</sup> Artinya, hukum Islam merupakan produk fikih Indonesia.

Istilah-istilah hukum Islam atau hukum *syara'* tersebut, menurut istilah ulama *uṣūl*, adalah doktrin (*khitab*) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*).<sup>24</sup> Menurut Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah bagian dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara umum.<sup>25</sup> Kemudian dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ulama *ushul fikih* mendefenisikannya dengan tuntutan Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat, penghalang, sah, batal, *rukhsah* (keringanan) atau

<sup>22</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 169.

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan Nasional (kini Kemendikbudristek), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 411.

<sup>24</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer dengan Judul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 153.

<sup>25</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Edisi Kedua (Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9.

'*azîmah* (perbuatan).<sup>26</sup> Hukum Islam dimaksudkan sebagai peraturan yang berpautan dengan kehidupan orang dewasa dalam melaksanakan perintah dan atau meninggalkan larangan berdasarkan petunjuk al-Qur'an atau hadis.

Istilah-istilah dari berbagai pengertian tentang hukum Islam itu, dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan istilah yang dikembangkan dan dibakukan di Indonesia. Karena itu istilah-istilah tentang pengertian hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam lima produk pemikiran hukum yaitu, fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, perundang-undangan, dan teori sosiologi hukum yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia yang terkait dengan ibadah *gairu mahdah*.

Pemaknaan hukum Islam di Indonesia merupakan hasil dari ijtihad ulama yang melahirkan kitab fikih yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga dipedomani oleh para peneliti dan penulis tentang hukum Islam di Indonesia. Hasil dari produk-produk pemikiran hukum Islam tersebut, diformulasikan dalam satu kitab atau buku yang menjadi rujukan dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam lembaga-lembaga perdilan dan instansi lainnya. Karena itu produk pemikiran hukum Islam berikut ini dapat dijelaskan pemaknaannya.

#### **D. Istilah Produk Pemikiran Fikih**

Istilah fikih adalah hasil dari produk pemikiran hukum yang pertama dari materi formulasi hukum Islam melalui kitab fikih itu sendiri. Kitab fikih pada awalnya hasil atau kumpulan dari ceramah atau fatwa ulama yang kemudian dihimpun dalam satu buku atau beberapa buku. Isi dari kumpulan fatwa tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang secara khusus bagi kehidupan umat Islam. Kitab fikih yang dimaksudkan adalah: Buku yang membahas berbagai persoalan hukum Islam seperti ibadah, muamalah, pidana, peradilan, jihad, perang, dan damai

---

<sup>26</sup>Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 572.

berdasarkan hasil ijtihad ulama fikih dalam memahami al-Qur'an dan hadis yang dikaitkan dengan realitas yang ada dengan menggunakan berbagai metode ijtihad.<sup>27</sup>

Penyusunan kitab fikih mulanya mengalami permasalahan karena persoalan dalam masyarakat belum banyak dipertanyakan sehingga tidak sistematis. Pembukuan kitab fikih dimulai sekitar awal abad ke-2 Hijriah yang disebut zaman klasik. Penulisan kitab fikih terus berkembang, mulai dari zaman klasik sampai sekarang zaman modern.

Kalau dilihat dari produk pemikiran fikih, maka isi kitab fikih paling tidak ada tiga macam yaitu: kitab fikih lengkap, kitab fikih tematis, dan kitab fikih berbentuk fatwa. Kitab fikih lengkap yaitu membahas seluruh persoalan fikih, mencakup masalah ibadah, muamalah, perkawinan, kewarisan, perwakafan, pidana, peradilan dengan perangkat-perangkatnya, politik, jihad, perang, dan damai.

Kitab fikih lengkap biasanya diproduksi dan disusun dari mazhab tertentu, dan adakalanya disusun dari berbagai mazhab dengan membandingkan pendapat-pendapat mazhab lain, misalnya "*Fikih Islam Lengkap*" yang ditulis oleh H. Moh. Rifa'i.

Kitab fikih tematis yaitu kitab yang hanya membahas topik tertentu, seperti masalah pemerintahan, masalah peradilan, masalah perdata, dan masalah pidana. Misalnya buku "*Peradilan Agama di Indonesia*" yang ditulis oleh Cik Hasan Bisri. Di zaman klasik, kitab fikih tematis belum banyak diterbitkan. Tetapi di zaman modern ini telah banyak diterbitkan karena ilmuwan telah banyak dan semakin meluas pembedangan ilmu.

Kitab fikih berbentuk kumpulan fatwa yaitu kitab yang disusun berdasarkan hasil fatwa ulama atau sekelompok ulama tertentu. Misalnya buku "*Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*" yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Setiap mazhab fikih mempunyai kitab fikih standar yang menjadi sumber rujukan, baik berupa kitab fikih lengkap, kitab fikih tematis, maupun kitab fikih berupa kumpulan fatwa.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 345.



### E. Istilah Produk Pemikiran Fatwa Ulama

Istilah fatwa menurut bahasa berarti jawaban, keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah nasihat orang alim, pelajaran baik.<sup>28</sup> Menurut ulama *uṣūl fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>29</sup> Fatwa ini bersifat sanksi moral yang tidak mengikat seseorang untuk berfatwa atau meminta fatwa.

Setelah produk pemikiran fikih, maka produk pemikiran hukum yang kedua adalah pemikiran fatwa ulama yang merupakan hasil dari materi formulasi hukum Islam. Fatwa ulama biasanya himbauan dari sekelompok ulama dan terkadang merupakan seruan ulama tertentu. Produk pemikiran fikih tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan produk pemikiran fatwa ulama, karena fikih merupakan produk hasil ijtihad ulama, dan ulama merupakan orang yang ahli dalam ilmu fikih dan mendapat pemahaman agamanya.

### F. Produk Pemikiran Yurisprudensi

Produk pemikiran yurisprudensi merupakan hasil pemikiran hukum dari keputusan pengadilan agama sehingga dijadikan sebagai hasil dari materi formulasi hukum Islam yang kemudian melahirkan Kompilasi Hukum Islam. Ide atau gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, mulanya dikemukakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A. pada bulan Februari 1985 di IAIN Sunan Ampel Surabaya (kini UIN). Mulai saat itu para akademisi dan praktisi hukum Islam mulai menggelinding dan mendapat respons yang positif dari berbagai lapisan masyarakat muslim. Malahan

---

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan Nasional (kini Kemendikbudristek), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, op. cit., h. 314.

<sup>29</sup>Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 326.

Presiden Republik Indonesia (Soeharto) mengambil prakarsa untuk melahirkan gagasan mengadakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Pada tanggal 25 Maret 1985, Mahkamah Agung dan Menteri Agama mengeluarkan keputusan dan menandatangani bersama di Yogyakarta berdasarkan Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985.<sup>30</sup>

Usaha penandatanganan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak di depan Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua-ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Militer se-Indonesia. Isi dari keputusan bersama tersebut adalah proyek “Pengembangan Hukum Islam melalui Yuriprudensi.” Yurisprudensi itu dinamakan Kompilasi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek. Tugas dari tim pelaksana proyek tersebut mengkompilasikan aturan hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber dan mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diperkuat oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Inpres inilah yang dijadikan dasar sebagai muatan materi hukum Islam di Indonesia.

### **G. Produk Pemikiran Perundang-Undangan**

Hadirnya produk pemikiran perundang-undangan ini tidak dapat dipisahkan dengan hasil produk hukum lainnya. Undang-undang lahir setelah mendapat respons positif dari masyarakat, terutama di kalangan lembaga legislatif dan lembaga-lembaga peradilan.

Istilah tentang perundang-undangan adalah meliputi berbagai aspek, baik aspek hukum, politik maupun sosial-budaya lainnya. Pengertian undang-undang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: Ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya),

---

<sup>30</sup>Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 970.

disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja, dan sebagainya), dan mempunyai kekuatan mengikat; aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa; hukum dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam.<sup>31</sup>

Tetapi perundang-undangan yang dimaksudkan adalah peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini menteri, disahkan oleh DPR, dan ditandatangani oleh presiden, kemudian dibuatkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri (permen).

Hasil produk pemikiran hukum telah dituangkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya dalam kerangka hukum Islam meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau instruksi presiden, keputusan/peraturan atau instruksi menteri, dan lembaga tinggi lainnya. Peraturan-peraturan tersebut meliputi tentang: Peradilan Agama; hukum keluarga Islam (perkawinan, kewarisan, dan perwakafan); ibadah sosial ekonomi; pendidikan dan kesehatan Islami; ekonomi syari'ah/ekonomi Islami; dan peraturan lainnya. Lembaga Peradilan Agama dalam pengembangannya semakin kompleks apalagi dengan menyatunya di Mahkamah Agung.

a. Peradilan Agama:

1. Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882 tentang Peraturan Peradilan Agama Islam di Jawa dan Madura.
2. Staatsblad Nomor 638 Tahun 1937 Jo. Nomor 639, Ordonansi tentang Peradilan Agama untuk Sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur .
3. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.

---

<sup>31</sup>Departemen Pendidikan Nasional (kini Kemdikbudristek), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1245.

4. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menye-lenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Luar Jawa Madura.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut merupakan inisiatif DPR dan pemerintah. Tanggal 13 Februari 2006 diadakan raker untuk membahas RUU tersebut, dan tanggal 20 Februari 2006 dilaksanakan pembicaraan tingkat kedua sebagai pengambilan keputusan mengenai RUU tersebut, yang pada akhirnya disahkan dan diundang pada tanggal 28 Februari

2006.<sup>32</sup> Inti dari undang-undang tersebut adalah pengembangan materi hukum terutama pasal 49 undang-undang tersebut.

12. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- b. Hukum Keluarga Islam (Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan):
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP. Nomor 10 Tahun 1983.

---

<sup>32</sup>Lihat Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 20.

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP. Nomor 10 Tahun 1983.
10. Surat Edaran Badan Administrasi Negara Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP. Nomor 10 Tahun 1983.
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pengertian Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian).
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia.

c. Ibadah Sosial Ekonomi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

d. Pendidikan dan Kesehatan Islami:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

e. Ekonomi Syari'ah/Ekonomi Islami:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 Perihal Penilaian Aktiva Produktif dalam Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah .

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah.
- f. Peraturan Lainnya:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
  4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

## H. Istilah Produk Pemikiran Teori Sosiologi Hukum

Istilah hukum Islam di Indonesia merupakan materi hukum yang diformulasikan ke dalam produk-produk pemikiran hukum, termasuk pemikiran teori sosiologi hukum. Sosiologi hukum dimasukkan sebagai salah satu produk pemikiran hukum karena ia menggunakan teori eksistensi yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, produk sosiologi hukum sebagai hasil dari pemikiran hukum yang dapat dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni (*pure science*), bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai.<sup>33</sup> Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat atau ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.<sup>34</sup> Jadi sosiologi merupakan ilmu tentang kemasyarakatan yang tak dapat

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru Kesatu (Cet. V; Jakarta: CV Rajawali, 1985), 19.

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan Nasional (kini Kemendikbudristek), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1084.



dipisahkan dengan peraturan atau hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi masyarakat yang taat pada hukum yang berlaku.

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang/peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>35</sup> Hukum dalam arti peraturan, berarti hukum merupakan hasil produk pemikiran manusia yang bersumber dari Kitab Allah swt. Sosiologi dan hukum, keduanya merupakan suatu proses untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat, oleh karena itu muncul satu disiplin ilmu tersendiri yang disebut sosiologi hukum.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., sosiologi hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>36</sup> Istilah sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh Anzilotti bangsa Itali tahun 1882. Sosiologi hukum lahir dari hasil refleksi pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi.

Sosiologi hukum dapat juga dikatakan sebagai ilmu tentang kenyataan dalam masyarakat, karena muncul dari anggapan dasar bahwa hukum timbul dan tumbuh dari proses gejala sosial dalam masyarakat. Tanpa gejala sosial dari masyarakat, maka hukum pun tidak berkembang.

Perkembangan sosiologi hukum di Indonesia sejak tahun 1976 ketika Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran memasukkan sosiologi hukum sebagai salah satu mata kuliah wajib. Demikian pula tahun 1980 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, mahasiswa diberikan kesempatan untuk meneliti dan menulis skripsi berdasarkan pendekatan ilmu sosiologi hukum.<sup>37</sup> Sosiologi hukum orientasinya pada hukum, dan pada dasarnya

---

<sup>35</sup>Departemen Pendidikan Nasional (kini Kemendikbudristek), h. 410.

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Cet. IV; Bandung: Alumni, 1986), h. 11.

<sup>37</sup>Otje Salmah, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Bandung: CV Armico, 1984), h. 22.

dipengaruhi oleh filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi. Hasil dari pemikiran ketiga disiplin ilmu tersebut menyatu dan melahirkan disiplin baru yaitu sosiologi hukum.

Salah satu sumber untuk mendapatkan materi pengembangan materi hukum adalah melalui sosiologi hukum, sehingga muncul paradigma sosiologi hukum, yaitu hukum diartikan dalam berbagai aspek yang meliputi: (1) hukum sebagai ilmu pengetahuan; (2) hukum sebagai suatu disiplin ilmu; (3) hukum sebagai peraturan perundang-undangan atau kaidah; (4) hukum sebagai tatanan hukum; (5) hukum sebagai lembaga sosial; (6) hukum sebagai alat dan petugas; (7) hukum sebagai keputusan penguasa; (8) hukum sebagai nilai; (9) hukum sebagai tindak-tanduk perbuatan; (10) hukum sebagai seni; dan lain-lain.

Melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, maka sosiologi hukum sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada interaksi sosial kemasyarakatan. Kegunaan-kegunaan sosiologi hukum antara lain: *Pertama*, sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial; *kedua*, sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan menganalisis efektivitas hukum dalam interaksi sosial masyarakat; dan *ketiga*, sosiologi hukum berguna untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.<sup>38</sup> Mempelajari sosiologi hukum berarti memperlancar dalam memahami aturan kehidupan masyarakat yang berorientasi pada ketertiban dan kedisiplinan dalam menaati hukum.

Terkait kegunaan-kegunaan sosiologi hukum tersebut dapat dianalisis bahwa salah satu fungsi dari sosiologi hukum adalah menjadi filter terhadap pengembangan hukum yang bersumber dari filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi yang berorientasi pada hukum.

Secara umum dipahami bahwa hukum Islam merupakan peraturan yang telah dibakukan di Indonesia untuk dijadikan

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Cet. XIV; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 26.

sebagai peroduk pemikiran hukum di Indonesia. Hukum Islam juga merupakan bagian dari hukum nasional, karena hukum nasional yang berlaku di Indonesia adalah bersumber dari tiga sumber hukum, yaitu: *pertama*, hukum adat; *kedua*, hukum Barat; dan *ketiga*, hukum Islam.

Sebenarnya hukum Islam telah lama dikenal di Indonesia yakni sejak zaman kesultanan dan penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Tetapi hukum Islam dijadikan sebagai hukum nasional bagi umat Islam setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Desember 1989. Kemudian diperkuat lagi setelah penyatuan atap lembaga-lembaga peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia hingga dikeluarkannya amandemen undang-undang tersebut.

Hasil amandemen undang-undang tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006. Hasil dari amandemennya adalah pengembangan materi hukum Islam di Indonesia, termasuk ekonomi syari'ah dan bagian-bagiannya telah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Hal ini lebih berkembang lagi dengan lahirnya revisi kedua, Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Materi pengembangan materi hukum Islam tersebut yang diatur dalam perundang-undangan, maka dapat dipahami bahwa pengembangan materi hukum Islam ke depan bukan hanya terbatas pada bidang-bidang perdata saja, tetapi juga pada bidang pidana. Misalnya, tindakan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, ke depan akan dimuat dan diatur dalam lingkungan Peradilan Agama. Jika kasus yang terjadi dalam rumah tangga tersebut adalah umat Islam, maka yang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama walaupun menyangkut unsur pidana. Hal ini terbukti dengan perluasan wilayah kewenangan Peradilan Agama pada bidang ekonomi umat Islam secara luas.

## BAB III

# HUKUM ISLAM DALAM LINTAS SEJARAH



**T**erkait dengan sejarah Islam, hukum Islam dalam hukum tertulis pertama kali diterapkan pada abad pertama Hijriah di Madinah oleh Nabi Muhammad saw. dengan dasar Konstitusi Piagam Madinah. Dalam mukaddimah piagam tersebut dijelaskan, bahwa Piagam Madinah tertulis dari Nabi Muhammad saw. berlaku di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk agama Islam yang berasal dari suku Quraisy dan Yatsrib. Juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri, dan berjuang bersama mereka.<sup>39</sup> Inti dari piagam tersebut adalah perjanjian/kesepakatan antara kaum muslim dengan kaum nasrani dan yahudi (masyarakat non muslim). Nabi Muhammad saw. memberi jaminan hidup terhadap mereka, hak milik, dan

---

<sup>39</sup>Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad Saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 21.

agama, serta mempunyai kebebasan penuh untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing.

Agama Islam di Indonesia, dalam sejarah sosial hukum Islam telah dijadikan sebagai tatanan hidup yang tumbuh dan berkembang sejak masuknya Islam di Indonesia pada abad VII Masehi di belahan bumi serambi Mekkah (Aceh),<sup>40</sup> yang kini dikenal dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam dan diberlakukan syari'at Islam di provinsi tersebut. Islam merupakan bagian terpenting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia, mulai masuknya atau kedatangannya Islam, fase kesultanan, zaman penjajahan, masa kemerdekaan hingga sekarang era reformasi.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, sehingga dalam kanca politik di Indonesia cukup mewarnai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terdiri dari sembilan orang, delapan orang di antaranya adalah beragama Islam dan satu orang beragama Kristen.

Dalam kancah perkembangan politik di Indonesia, materi politik muncul dan dapat dibagi dalam tiga dekade: (1) materi pada masa berlakunya sistem demokrasi liberal parlementer yang dimulai setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959; (2) materi politik pada masa demokrasi terpimpin yang mulai tahun 1959 sampai tahun 1966; (3) materi politik pada masa demokrasi Pancasila sejak 1966 sampai sekarang.<sup>41</sup> Sistem demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan

---

<sup>40</sup>Endang Syaifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya* (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 239.

<sup>41</sup>Benny K. Harman, *Materi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1997), h. 60. Lihat pula, Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Cet. XIII; Jakarta: PT Gramedia, 1991), h. 69.

menonjolkan sistem presidensial.<sup>42</sup> Pergolakan politik semakin gencar termasuk materinya adalah pengembangan hukum Islam di Indonesia.

Kelompok politisi berjuang di parlemen untuk menggolkan ide-ide dari partainya. Kalau partainya bernuansa nasionalis, maka paham dan wawasan kebangsaan yang menonjol. Kalau partainya bernuansa Islami, maka pengembangan hukum Islam yang ditonjolkan. Pergolakan pun semakin gencar, persaingan politik antara wawasan nasionalisasi dan wawasan Islamisasi diperebutkan. Para politisi tersebut, mereka adalah mayoritas beragama Islam, tetapi yang menonjol wawasan nasionalisasi. Pada hal, umat Islamlah yang paling banyak mengambil bagian untuk berjuang demi meraih kemerdekaan hingga mempertahankannya.

Umat Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam yang merupakan produk pemikiran hukum umat Islam di tanah air. Dalam proses perjalanan sejarah keberadaan hukum Islam di Indonesia, membawa dampak bagi bangsa Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya antara lain memperkaya produk hukum di Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya adalah menjadikan umat Islam berkotak-kotak dalam menjalankan syari'at Islam dan juga menjadikan umat lain merasa tertekan. Hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi dalam penerapan hukum Islam, baik terhadap umat Islam sendiri maupun terhadap umat lain. Pro dan kontra selalu terjadi pada masyarakat dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam pada masa prakemerdekaan, pelaksanaan dan kebijakan ditentukan oleh bangsa penjajah. Tetapi pada masa

---

<sup>42</sup>Sistem presindensial tersebut dimaksudkan adalah pemerintahan republik yang kepala negaranya atau presidennya langsung memimpin kabinet. Kabinet tersebut adalah badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri. Liberal adalah sistem politik dengan banyak partai, kekuasaan politik berada di tangan politisi sipil yang berpusat di parlimen. Terpimpin (10 November 1956) adalah corak pemerintahan yang mengenal satu pemimpin menuju tujuan suatu suatu masyarakat yang berkeadilan sosial.

kemerdekaan dan pasca kemerdekaan (orde lama), kebijakan dan pelaksanaannya ditentukan pemerintah Indonesia di bawah kendali Presiden Soekarno, walaupun belum banyak yang bisa dilakukan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), misalnya DI/TII. Sedangkan faktor eksternal berasal dari bangsa penjajah yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, bangsa Belanda yang dikenal dalam sejarah dengan istilah “mereka kembali”. Kendala lain adalah pemerintah Indonesia belum memaksimalkan bangsanya untuk mengetahui dan mempelajari sejarah sosial hukum Islam, baik di bangku sekolah maupun di luar sekolah (sekolah formal, informal, dan non formal).

Negara Republik Indonesia, sebagai negara kesatuan ingin mewujudkan suatu negara yang damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, semua unsur bangsa harus ikut terlibat dalam mengambil bagian demi kejayaan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, tidak terkotak-kotak dan tidak saling menyalahkan antara satu dengan lainnya. Sejarah telah mencatat bahwa dengan persatuan dan kesatuan bangsa penjajah dapat diusir dari bumi pertiwi yang tercinta. Tidak hanya persatuan dan kesatuan, juga peraturan perundang-undangan harus jelas dan tidak merugikan pihak tertentu.

Dengan pengalaman tersebut diperlukan suatu peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara dalam lingkungan peradilan di Indonesia, termasuk Peradilan Agama. Salah satu di antaranya adalah Peradilan Agama yang merupakan pelaksana (sekarang pelaku) kekuasaan kehakiman dalam perkara perdata tertentu (sekarang perkara tertentu). Tetapi dalam pengembangannya tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pada perkara-perkara ekonomi lainnya termasuk perkara pidana. Sejarah hukum Islam telah membuktikan bahwa betapa

berkembangnya materi hukum Islam dalam perkara-perkara di pengadilan.

Secara global penulis sejarah hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam ke dalam lima masa seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu meliputi : (1) masa Nabi Muhammad Saw. (610 M sampai 632 M); (2) masa Khulafaurrasyidun (632 M sampai 662 M); (3) masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan (abad VII sampai X M); (4) masa kelesuan pemikiran (abad X M sampai XIX M); dan (5) masa kebangkitan kembali (abad XIX M sampai sekarang).<sup>43</sup> Masa kebangkitan inilah yang menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa Barat yang tidak senang dengan kebangkitan umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun hukum terutama pengembangan hukum Islam.

Pada pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan hukum Islam, sumber lain menyebutkan bahwa ada enam periode yang dilalui yaitu sebagai berikut: (1) periode Rasulullah Saw.; (2) periode Khalifah atau Khulafaurrasyidun; (3) periode setelah Khulafaurrasyidun sampai awal abad II H; (4) periode awal abad II H sampai pertengahan abad IV H; (5) periode pertengahan abad IV H sampai jatuhnya kota Bagdad; dan (6) Periode jatuhnya kota Bagdad sampai sekarang.<sup>44</sup> Sekarang dikenal sebagai periode kebangkitan umat Islam terutama pada pengembangan materi hukum Islam di Indonesia.

Pada kedua pembagian waktu tersebut, pada dasarnya sama, karena sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam semua dimulai dari Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang. Tentunya di Indonesia hukum Islam masuk bersamaan dengan

---

<sup>43</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam (Cet. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 139.

<sup>44</sup>Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* diterjemahkan oleh Dedi Junaedi dan Hamidah dengan judul *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1996), h. 11-12.



masuknya Islam ke wilayah Nusantara melalui kesultanan atau kerajaan.

Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah mengenal Islam, telah melaksanakan hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai kasus di wilayah kerajaan masing-masing. Adanya hukum Islam di Indonesia dimulai dari kesultanan yang memeluk agama Islam. Hukum Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur, terutama ditentukan oleh penguasa, antara lain melalui kerajaan atau kesultanan.

### A. Masa Kesultanan

Bukti sejarah tentang proses masuknya Islam ke Indonesia, paling tidak ada dua pendapat. *Pertama*, masuknya Islam ke Indonesia berlangsung sejak abad I H (abad VII M) sekitar tahun 674 M. *Kedua*, Islam masuk ke Indonesia terjadi pada abad XIII M sekitar (1258 M).<sup>45</sup> Tetapi menurut sumber dari hasil seminar nasional yang ditulis oleh Endang Syaifuddin Anshari bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali pada abad I H (abad VII M/VIII M) yang dibawa oleh orang-orang Arab. Daerah yang didatangi ialah daerah pesisir Sumatera khususnya kerajaan Islam pertama di Aceh.<sup>46</sup> Daerah-daerah lain sesudah yang didatangi oleh Islam sesudah Aceh adalah Minangkabau, Jawa, Maluku, Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa, dan Kalimantan.

Berkembangnya Islam di Indonesia merupakan proses pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, karena Islam dan hukum Islam berkaitan langsung dengan kehidupan umat Islam di Indonesia. Adanya keterkaitan langsung antara hukum Islam dengan kehidupan masyarakat Islam, maka terjadi reaksi, baik dari luar maupun dari dalam umat Islam sendiri, terutama dari kerajaan.

---

<sup>45</sup>Dudung Abdurrahman, dkk., *Sejarah Peradaban Islam: dari Masa Klasik Hingga Modern* (Cet. I; Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Lesfi, 2003), h. 377.

<sup>46</sup>Lihat Endang Syaifuddin Anshari, h. 240.

Sebagai pejabat atau pemangku kerajaan-kerajaan Islam yang melaksanakan hukum Islam antara lain: Samudera Pasai (berdiri pertengahan abad ke-13 sampai tahun 1524), Aceh Darussalam (berdiri tahun 1514), Kerajaan Demak (berdiri tahun 1500-1550), Cirebon (berdiri abad ke-16), Banten (berdiri tahun 1568-1813), dan lain-lain.<sup>47</sup> Pada fase kesultanan tersebut banyak kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri dan melawan kaum penjajah, termasuk Kerajaan Mataram.

Pada tahun 1619 ketika Mataram berada di bawah pemerintahan Sultan Agung, praktis seluruh Jawa Timur berada di bawah pemerintahan Islam. Ketika itu terjadi konflik bersenjata antara pemerintahan kerajaan dengan VOC dan gugurlah Sultan Agung. Dengan gugurnya Sultan Agung, maka pemerintahan dikendalikan oleh Amangkurat I, konflik pun semakin menjadi-jadi. Malahan konflik terjadi antara pemerintah dengan kelompok ulama oleh karena keprihatinan terhadap agama yang diterapkan oleh pemerintah. Amangkurat I marah dan tidak butuh gelar sultan, bahkan tahun 1647 ia membunuh 5000 sampai 6000 orang ulama karena dianggap membahayakan tahtanya.<sup>48</sup> Inilah reaksi internal umat Islam sebagai konflik yang terjadi dalam pelaksanaan hukum Islam.

## **B. Masa Penjajahan**

Faktor kendala eksternal yang dihadapi oleh umat Islam adalah berasal dari penjajah. Tahun 1511 bangsa Portugis datang dan memunculkan persaingan penyebaran agama Islam dengan Kristen, tetapi digagalkan oleh kekuatan umat Islam. Kekuatan Islam juga didukung oleh kerajaan Gowa dan Tallo yang mengadakan hubungan baik dengan kerajaan lain. Dan kemudian konflik-konflik internal mulai terjadi seiring dengan campur tangan penjajah yaitu Portugis dan Belanda.

---

<sup>47</sup>Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 968.

<sup>48</sup>Dudung Abdurrahman, dkk., *op. cit.*, h. 388.

Masuknya hukum Islam pada masa penjajahan (prakemerdekaan) khususnya penjajahan Belanda, dijumpai beberapa macam instruksi Gubernur Jenderal yang ditujukan kepada bupati untuk memberi kesempatan bagi ulama menyelesaikan perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam. Keputusan Raja Belanda (*Koninkelijk Besluit*) Nomor 19 tanggal 24 Januari 1882, dirumuskan dalam *Staatblad* tahun 1882 Nomor 152 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama, berarti bahwa hukum berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya (*receptio in complexu*) merupakan teori Van Den Berg. Teori ini dibantah oleh Snouck Hurgronje yang menganut paham *teori receptie* tahun 1874-1936 (hukum Islam dipandang sebagai hukum apabila diterima oleh hukum adat),<sup>49</sup> terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

Implementasi hukum perkawinan di Indonesia diberlakukan dengan sistem hukum yang sesuai dengan syari'at dan sistem hukum positif sekitar tahun 1882.<sup>50</sup> Hal ini merupakan masalah politik hukum Belanda. Semua doktrin hukum hanya dapat berlaku apabila ditopang oleh tiga pilar penyangga, yaitu aparat hukum yang andal, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Hukum Belanda dalam politik hukumnya adalah bermuatan *divide et impera*, bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan bentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintah kolonial. Menurut kolonial, musuh mereka bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Mereka melihat kenyataan bahwa seringkali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda. Walaupun masyarakat Islam Indonesia agak terseok-seok, maka dengan tinggi kesadaran hukum sehingga berhasil memancangkan tonggak sejarah.

---

<sup>49</sup>Lihat Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 55.

<sup>50</sup>Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (Histori, Text and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law Religion, 1987), h. 205.

Kesadaran masyarakat Islam terhadap hukum Islam yang berlaku pada masa kerajaan/kesultanan dan penjajahan Belanda ialah dengan menggunakan teori *receptie*. Menurut Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., teori ini mengajarkan bahwa hukum Islam baru boleh dijalankan bilamana telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat adat.<sup>51</sup> Teori ini merupakan kebiasaan bagi masyarakat, sehingga dipatuhi dan dilaksanakan.

Kebiasaan dan keadaan masyarakat demikian, juga berlangsung pada masa penjajahan Jepang selama tiga setengah tahun. Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Keadaan yang genting itu berlangsung sampai tiba saatnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada saat itulah bangsa Indonesia mulai menghirup udara segar bagi seseorang mengalami kemerdekaan yang bebas dari tekanan kaum penjajah.

### **C. Masa Kemerdekaan**

Sebuah masa penantian yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia ialah masa kemerdekaan merupakan keadaan yang kondusif terhadap segala perkembangan, terutama pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Segala aspek kehidupan serba terbuka, kesempatan mengecap dunia pendidikan dengan segala konsekuensinya dan menyerap berbagai informasi dunia. Suasana merdeka membawa dampak yang luas bagi setiap orang.

Pemberlakuan hukum Islam secara utuh tentunya mempunyai resiko yang tinggi, karena keadaan bangsa Indonesia belum stabil secara seksama. Untuk melaksanakan hukum Islam tersebut maka ada tiga pilar hukum yang harus berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum itu. Pilar yang telah disebutkan di atas yakni aparat hukum yang andal, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, hendaknya dilakukan secara konsekuen. Ketiga pilar hukum itu

---

<sup>51</sup>Mohammad Daud Ali, h. 233.

mulai dibenahi, peraturan hukum keluar satu demi satu, dan kesadaran hukum masyarakat terus dipacu, walaupun belum mencapai titik secara optimal.

Keesokan harinya sesudah pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yakni tanggal 18 Agustus 1945, konstitusi negara Republik Indonesia bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno (Presiden Republik Indonesia yang pertama). Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia pascakemerdekaan telah dilalui dalam tiga orde, yaitu orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

### 1) Orde Lama

Orde lama ini dikenal dengan masa kekuasaan yang serba mengalami kegoncangan, baik dari dalam negeri maupun gangguan dari luar negeri. Masa orde lama ini diupayakan kembali untuk memasukkan syari'at Islam ke dalam Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila pada sila pertama melalui Piagam Jakarta "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan kata "Ketuhanan Yang Maha Esa", dari sembilan kata menjadi empat kata.

Orde lama secara politis, umat Islam gagal dalam menjalankan syari'at Islam sebagai eksistensinya dalam perjalanan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan oleh legislatif jangan sampai sejarah terulang untuk mendirikan negara di atas negara yang telah berdaulat. Orde lama ini pun bangsa Indonesia mengalami guncangan, baik pengaruh dari luar maupun dari dalam negeri. Pengaruh dari luar adalah dari bangsa penjajah khususnya Belanda, mereka ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Umat Islam memusatkan perhatiannya pada guncangan dari luar itu yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Umat Islam tidak lagi terfokus pada pelaksanaan hukum Islam, tetapi bagaimana bisa mengusir kolonial penjajah tersebut.

Gangguan orde lama ini, selain mengalami gangguan dari eksternal, juga mengalami gangguan dari internal bangsa Indonesia sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dikenal dengan peristiwa Madiun tahun 1948 dan G 30 S/PKI tahun 1965, yang menghancurkan stabilitas keamanan bangsa Indonesia. Usai goncangan PKI yang belum lama berhenti, kemudian bangsa Indonesia diguncang lagi dan dikacaulakukan oleh bangsa Indonesia sendiri yang berasal dari DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Usaha untuk mendirikan negara Islam (DI/TII) yang dilakukan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, Daud Beureuh di Aceh, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Namun atas berkat rahmat Allah swt., semua gagal, karena wawasan kebangsaan yang lebih mewakili perdamaian Negara Indonesia pada waktu itu.

Tidak lama gangguan dari DI/TII muncul lagi gangguan PKI pada tahun 1965, PKI kembali membantai tokoh-tokoh umat Islam termasuk para jenderal, mulai dari jenderal berbintang empat hingga perwira menengah. Bukan hanya tokoh umat Islam yang dibantai, tetapi para Pahlawan Revolusi pun diculik, disiksa, dan dibunuh oleh PKI, tanpa perikemanusiaan.

Kedua macam bentuk pemberontakan tersebut tujuannya ingin mengganti dasar Negara Indonesia dengan dasar negara lain menurut kehendak pemberontak. PKI ingin mengganti menjadi negara komunis, sedangkan DI/TII ingin mengganti menjadi negara Islam.

Akibat dari gangguan pemberontakan tersebut umat Islam tidak fokus dalam pembinaan terhadap hukum Islam. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan hukum Islam di masa orde lama. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan hukum Islam, adalah dengan hadirnya beberapa tokoh Islam, baik dalam struktur pemerintahan maupun dalam legislatif termasuk lembaga-lembaga pendidikan.

Pemberlakuan dan pelaksanaan hukum Islam khususnya di bidang perkawinan mengalami perdebatan yang alot tentang proses pemberlakuan dan/atau rancangan undang-undang

perkawinan tersebut. Tahun 1946-1955 legislasi hukum perkawinan diberlakukan sesuai dengan hukum peninggalan kolonial Belanda.<sup>52</sup> Pelaksanaan hukum Islam pada orde lama belum terlalu nampak, karena masih berkiprah pada hukum perkawinan dan hukum warisan peninggalan kolonial Belanda.

Sebuah keniscayaan adalah saksi sejarah terhadap umat Islam dalam masa orde lama ini di bawah pimpinan Bung Karno adalah berdirinya bangunan Masjid Istiqlal di Jakarta. Demikian juga bangunan pendidikan seperti pondok-pondok pesantren, terutama di pulau Jawa, baik pondok pesantren klasik maupun pondok pesantren modern.

## 2) Orde Baru

Perubahan dari orde lama ke orde baru, dikenal dengan penggantian pucuk pimpinan negara, dari Presiden Soekarno (selama 21 tahun dari tahun 1945-1966) ke Presiden Soeharto (selama 32 tahun dari tahun 1966-1998). Orde lama tumbang kemudian muncul orde baru. Orde baru ini dalam proses sosialisasi hukum Islam mulai nampak dengan hadirnya berbagai perundang-undangan, dan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Misalnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an pertama tingkat nasional tahun 1969 di Makassar. Kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya masih juga terbatas, karena pemerintah masih mencari pola yang cocok untuk kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Hal yang menyulitkan bagi pemerintah orde baru ini adalah usaha kodifikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu. Kesulitan ini disebabkan adanya semangat dan kemajemukan tatanan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang meliputi hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam.<sup>53</sup> Ketiga hukum tersebut merupakan sumber produk terhadap hukum nasional di Indonesia.

---

<sup>52</sup>Lihat Tahir Mahmood, h. 206.

<sup>53</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 17.

Demikian halnya pengembangan hukum Islam diarahkan pada upaya pembaruan secara terarah dan terpadu. Antara lain kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan yang baru dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan.<sup>54</sup> Pembangunan di bidang hukum mulai diarahkan, termasuk hukum perkawinan yang bernuansa Islami.

Era tahun 1967-1968 ada dua konsep tentang prinsip hukum perkawinan, yakni prinsip matrilineal dan prinsip patrilineal.<sup>55</sup> Sedangkan Islam menganut prinsip patrilineal terutama dalam hukum kewarisan Islam. Pada bulan Juli 1972 diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan sebagai undang-undang, dan pada bulan Januari 1974 rancangan tersebut disahkan sebagai undang-undang, yakni Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>56</sup> dan tahun 1975 undang-undang tersebut telah terimplementasi ke masyarakat luas, khususnya masyarakat Islam,<sup>57</sup> sehingga harus ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu produk hukum Islam di Indonesia. Demikian halnya produk-produk hukum lainnya diundangkan untuk kepentingan dan pengembangan materi hukum terutama materi hukum Islam.

Setelah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan hukum Islam mulai nampak di dalam masyarakat, terutama dalam lingkungan badan Peradilan Agama. Oleh karena itu, maka tugas-tugas badan Peradilan Agama menjadi meningkat dari 35.000 perkara menjadi 300.000 perkara dalam setiap tahun di seluruh Indonesia.<sup>58</sup> Adanya peningkatan kasus tersebut dapat

---

<sup>54</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 18.

<sup>55</sup>Lihat Tahir Mahmood, h. 207.

<sup>56</sup>Lihat Tahir Mahmood, h. 207.

<sup>57</sup>Lihat Tahir Mahmood, h. 208.

<sup>58</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 117.



mendorong usaha peningkatan sumber daya aparatur hukum, terutama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Usaha pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan disusul dengan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjadikan masyarakat muslim dalam hukum keluarga semakin terarah. Semua produk hukum Islam ini mengalami proses yang cukup alot, baik tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan reaksi masyarakat yang pro kontra, baik dari masyarakat non-muslim maupun dari internal umat Islam itu sendiri, lahiriah konsep perumusan KHI.

Perumusan KHI tersebut didasarkan atas landasan historis, yuridis, dan fungsional. Landasan historis adalah terkait dengan pelestarian hukum Islam di Indonesia, sekaligus merupakan perwujudan nilai-nilai yang bersifat abstrak dan sakral.

Sebagai landasan yuridis adalah terkait dengan tuntutan normatif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian, landasan fungsional adalah terkait dengan kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 3) Orde Reformasi

Pada era reformasi, dikenal sebagai masa kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat. Demonstrasi terjadi dan bergulir di berbagai penjuru kota di Indonesia. Dalam era ini tumbanglah orde baru tahun 1998, lahiriah partai-partai Islam untuk dijadikan sebagai wadah aspirasi umat Islam. Orde reformasi ini sebagai orde kebebasan dalam menyampaikan aspirasi terutama bagi para mahasiswa yang merupakan pejuang reformasi yang juga didukung oleh anggota dan pimpinan MPR RI di bawah komando Amien Rais sebagai ketua MPR RI saat itu.

Hasil dari kebebasan berpendapat itu, lahiriah produk hukum Islam seperti undang-undang zakat, haji, perwakafan,

hingga terakhir adalah undang-undang sisdiknas serta rancangan undang-undang pornoaksi dan pornografi yang telah diundangkan. Sebelum diundangkan undang-undang tersebut oleh DPR, terjadi gelombang massa, baik yang mendukung maupun yang menolak terutama rancangan undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi. Terakhir dalam materi produk pemikiran hukum Islam adalah undang-undang tentang hukum pidana Islam, yang kini sedang digodok di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diundangkan, sehingga hukum Islam di Indonesia semakin mencapai titik klimaks.

Seiring dengan lahirnya orde reformasi saat itu pula, pemerintahan Republik Indonesia telah dipimpin oleh tiga orang presiden, masing-masing Presiden B.J. Habibie dengan nuansa keilmuan dan keislaman. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan nuansa keulamaan dan kekiyaaian (pembaru). Presiden Megawati Soekarnoputri yang akrab dipanggil Mbak Mega dengan nuansa nasionalisme yang tinggi yang diwariskan oleh ayahandanya, yakni Presiden Soekarno. Kini Republik Indonesia di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sapaan SBY Sang Demokrat yang didampingi oleh Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dengan sapaan Bang Ucu Sang Pengusaha Sukses.

Kini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah dipimpin oleh tujuh orang presiden, kesemuanya adalah beragama Islam. Tetapi juga belum melahirkan syari'at Islam secara menyeluruh, kecuali pemerintah memberikan otonomi khusus, yaitu pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah dilanda peperangan yang dikenal dengan nama "operasi terpadu". Dalam hal ini masyarakat menginginkan agar pertikaian tersebut berakhir dengan damai, karena kedamaian dan ketenteraman adalah idaman bagi setiap warga negara. Terbukti dengan pemerintahan SBY – Kalla dapat mengakhiri konflik antara TNI – GAM dengan damai dan aman. Hal lain yang bernuansa positif yang dilakukan oleh SBY adalah

pemberantasan korupsi di tubuh para penegak hukum dan pejabat tinggi di Republik Indonesia. Begitu banyaknya ide dan gagasan SBY dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi perjalanan bangsa Indonesia, ia juga tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat spiritual. Sebagai orang Islam yang taat, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam menjadi sangat fundamental dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan.<sup>59</sup> Demikian halnya materi hukum Islam lainnya sangat diperhatikan untuk dikembangkan, tergantung para praktisi muslim yang ada di lembaga legislatif.

Pengembangan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia dari waktu ke waktu telah banyak dilalui, cukup banyak pengalaman yang dilewati bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, melalui beberapa tahapan, mulai dari fase prakemerdekaan (fase kerajaan atau kesultanan, zaman penjajahan) sampai masa pasca kemerdekaan dalam tiga masanya (orde lama, orde baru, dan era/orde reformasi).

Pelaksanaan hukum Islam pada masa prakemerdekaan (fase kerajaan atau kesultanan dan zaman penjajahan) ialah umumnya dengan memakai teori *receptie* yakni hukum Islam baru boleh dijalankan bilamana telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat adat. Namun menjelang detik-detik kemerdekaan tepatnya 22 Juni 1945 sampai 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta diberlakukan. Pemberlakuan hukum Islam semakin kuat, apalagi termuat dalam sila pertama *Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Adanya kalimat syari'at Islam berarti hukum Islam diterapkan tetapi khusus bagi orang-orang Islam. Pelaksanaan hukum Islam pada masa pasca kemerdekaan, ditandai dengan orde lama dan mulai tanggal 18 Agustus 1945, dengan merujuk pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945, dan tujuh kata pada Piagam

---

<sup>59</sup>Usamah Hisyam, dkk., *SBY Sang Demokrat* (Jakarta: Dharmapena, 2004), h. 812.

Jakarta (Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya) diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada masa orde baru sebagai orde penguasa tunggal, pelaksanaan hukum Islam mulai nampak dan berdasarkan pada undang-undang terutama dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan amandemennya, serta undang-undang lainnya termasuk kepres/inpres dan kepmen/permen. Kemudian pada orde reformasi, pelaksanaan hukum Islam semakin luas dengan lahirnya undang-undang yang khusus berlaku bagi umat Islam, lahirnya otonomi khusus pelaksanaan syariat Islam (Aceh) dan partai-partai yang berazaskan Islam. Proses sosialisasi hukum Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan yang mendekati titik klimaks, walaupun dengan melalui perjuangan dan pengorbanan, baik dalam menangkai serangan dari luar maupun dari dalam negeri.

Perjuangan dalam pengembangan hukum Islam di orde reformasi tersebut, pengembangan materi hukum Islam selalu diperbincangkan, baik dalam lingkungan akademisi, praktisi maupun politisi. Yang paling hangat perbincangan pada awal orde reformasi tersebut adalah menyangkut undang-undang tentang anti pornoaksi dan pornografi.

Pergolakan tentang aksi demonstrasi dari berbagai lapisan masyarakat silih berganti antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap rancangan undang-undang tersebut. Para politisi di lembaga legislatif pun terjadi perdebatan yang hangat, akibat dari desakan masyarakat untuk segera diundangkannya dan demikian pula sebaliknya ada juga yang menolak diundangkannya rancangan undang-undang pornoaksi dan pornografi.

Perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam dalam lintas sejarah di Indonesia pada dasarnya hanya dua masa yakni masa prakemerdekaan dan masa pascakemerdekaan. Pada masa prakemerdekaan itu meliputi dua kurun waktu, yakni fase

kesultanan/kerajaan dan zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan inilah yang banyak dihasilkan hukum Islam ketimbang pada fase kesultanan/kerajaan.

Fase pascakemerdekaan meliputi tiga kurun waktu, yakni orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Melihat perkembangan hukum Islam dari ketiga kurun waktu ini, maka pengembangan hukum Islam di luar hukum kekeluargaan cenderung dan terjadi dalam era reformasi ini. Pengembangan materi hukum Islam di Indonesia yakni meliputi kekhususan dalam ekonomi syari'ah.

Pelaksanaan dan penerapan ekonomi syari'ah ini merupakan hasil dan bukti dari produk pengembangan materi hukum Islam di Indonesia, yang sebelumnya hanya meliputi bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kini telah menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama di Indonesia untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah dalam masyarakat muslim di Indonesia, sekalipun belum diterapkan secara menyeluruh.

Konsep pemikiran hukum Islam lainnya yang merupakan pengembangan materi hukum Islam ke depan adalah bidang selain keperdataan yakni menyangkaut pidana Islam. Kini penerapan pidana Islam di Indonesia merupakan kebutuhan sebagian umat Islam di Indonesia, yakni dibuktikan dengan gerakan umat Islam terhadap penegakan dan penerapan syari'at Islam di Indonesia. Meskipun tidak dilaksanakan secara nasional, kini masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam telah menerapkannya dan dilaksanakan berdasarkan pengakuan secara konstitusi nasional Indonesia. Penerapan ini merupakan bagian hukum Islam yang telah diakui oleh masyarakat maupun negara dan bangsa Indonesia.

Usaha dalam menerapkan dan mengimplementasikan syari'at Islam secara nasional di negara Republik Indonesia, berarti materi hukum Islam semakin kompleks dan tercerahkan. Oleh karenanya, lembaga maupun sumber daya manusianya dipersiapkan sedini mungkin, sehingga dalam penerapan materi hukum Islam tersebut tidak salah sasaran. Kalau salah sasaran,

akan menimbulkan persoalan dalam tubuh umat Islam sendiri. Akan tetapi jika telah dipersiapkan perangkat-perangkat pengembangan materi hukum Islam sedini mungkin, maka penegakkan syari'at Islam tidak menimbulkan masalah yang komprehensif.

## BAB IV

# HUKUM ISLAM DAN PENGEMBANGANNYA



Pengembangan, keberadaan, dan eksistensinya hukum Islam di Indonesia dalam penerapannya terus mengalami perkembangan seiring dan sejalan dengan pertumbuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Hukum Islam berkembang di Indonesia, karena penduduknya mayoritas beragama Islam dan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas ilmu yang berkualitas. Terbukti dengan berhasilnya mengusir bangsa penjajah dari bumi Indonesia, walaupun senjata dan peralatan lainnya sangat sederhana bila dibandingkan dengan kaum penjajah. Tetapi karena bangsa Indonesia cerdas, maka berhasil mengusir kaum penjajah, penghianat, dan para pemberontak. Setiap bangsa mengalami gangguan/kegoncangan baik dari dalam maupun dari luar negeri, bangsa Indonesia bersama seluruh rakyatnya bersatu mengusir dan berhasil mematahkan gangguan tersebut. Tetapi sebagai bangsa yang beragama meyakini bahwa semua itu merupakan rahmat/pertolongan dari Allah swt.

Bangsa Indonesia menggunakan taktik dan strategi untuk mengimbangi musuh-musuh yang memiliki peralatan lengkap. Salah satu taktik dan strategi yang tidak diperhentikan dengan saksama oleh kaum penjajah, penghianat, dan pemberontak adalah umat Islam yang gagah berani dalam menghadapi musuh-musuhnya. Umat Islam tampil di depan untuk mengambil bagian dalam menegakkan kebenaran. Keberanian itu muncul karena keyakinan, antara lain bahwa membela tanah air adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab bagi setiap muslim.

Tugas dan tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari hukum Islam. Hasil-hasil dari perjuangan umat Islam tersebut antara lain meliputi: hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum nasional, dan pengembangan kompetensi Peradilan Agama ke depan.

### **A. Sumber Hukum Islam di Indonesia**

Nama Indonesia sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Belanda mempunyai asumsi bahwa Indonesia yang diberi nama Hindia Belanda merupakan wilayah yang belum dihuni oleh manusia yang mempunyai aturan. Ternyata Indonesia sudah mempunyai aturan dan diberlakukan yakni hukum Islam. Asumsi penjajah Belanda itu sangat jauh dari kenyataan yang ada di Indonesia, sebab hukum Islam sudah lama ada jauh sebelum datangnya bangsa penjajah.

Agama Islam sebagai agama wahyu dari Allah swt. telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum datangnya kaum penjajah. Masuknya Islam ke Indonesia masih mempunyai pendapat yang kontradiksi. Menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dalam bukunya *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad I Hijriah, dan ada yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad VII Hijriah atau pada abad ke-13 Masehi.<sup>60</sup> Sedangkan penjajah

---

<sup>60</sup>H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: STIH Iblam, 2004), h. 22.



Belanda datang ke Indonesia pada abad ke-18 M. Dengan masuknya Islam ke Indonesia berarti secara hukum, aturan yang diberlakukan adalah berdasarkan hukum Islam. Hukum Islam dilaksanakan dan dipatuhi bagi pemeluk agama Islam, dan bagi non muslim hukum Islam tersebut dihormati.

Masa pertengahan abad ke-14 Masehi, sebuah fakta sejarah menunjukkan bahwa ada seorang ahli agama Islam muncul dan berpengaruh di Indonesia yang berasal dari Samudra Pasai. Tokoh agama itu bernama Sultan Malikul Zahir. Dengan munculnya Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai itu, berdatanganlah para ahli hukum ke Samudra Pasai terutama dari Kerajaan Malaka dan mereka belajar untuk membahas permasalahan hukum, terutama hukum Islam.<sup>61</sup> Kemudian bermunculan kerajaan-kerajaan Islam dan berusaha mengislamkan rakyatnya, sehingga menerapkan hukum Islam kepada para penduduknya. Kerajaan yang datang kemudian itu antara lain Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Cirebon.

Mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dalam lintas sejarah, penulis telah menguraikan terdahulu pada bab II. Namun pemberlakuan hukum Islam sebelum Indonesia merdeka banyak dipengaruhi oleh penjajah Belanda, mempunyai keterkaitan pada pembahasan berikut, terutama yang menyangkut teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Untuk menyatakan bahwa hukum Islam sebagai sumber hukum nasional, perlu diketahui beberapa teori yang berkenaan dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Teori-teori tersebut adalah: teori *Receptio in Complexu*, teori *Receptie*, teori *Receptie Exit*, teori *Receptio A Contrario*, dan teori *Eksistensi*. Teori-teori tersebut memberikan pemahaman terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Setiap teori tersebut mempunyai kekhususan masing-masing, namun saling terkait satu sama lain.

---

<sup>61</sup>Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 69.

### 1) Teori *Receptio in Complexu*, Teori *Receptie*, dan Teori *Receptie Exit*

Zaman VOC, penjajah Belanda mengakui hukum Islam di Indonesia sejak tahun 1855. Penjajah Belanda mempertegas pengakuan terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, yang diperkuat oleh Londewijk Willem Christian van den Berg dengan teori *Receptio in Complexu*,<sup>62</sup> yang memberi kebebasan bagi pemeluk agama di Indonesia.

Teori *Receptio in Complexu* adalah teori yang mengatakan bahwa setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi penduduk yang beragama Islam tentu diberlakukan padanya hukum Islam. Demikian juga dengan penduduk yang beragama lain diberikan kepadanya untuk diberlakukan hukum agamanya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29.

Munculnya teori *Receptio in Complexu* ini disebabkan kesadaran masyarakat akan taat kepada ajaran agamanya. Teori ini berasal dari pakar hukum Islam asal Belanda yang tokohnya adalah Londewijk Willem Christian van den Berg, selain ahli dalam hukum Islam juga ahli dalam politik. Dengan berlakunya teori *Receptio in Complexu* ini di Indonesia, dibentuklah lembaga peradilan. Adanya pengakuan lembaga peradilan, maka terbentuklah Pengadilan Negeri (*Landraad*) dan Pengadilan Agama (*Priesterrad*). Hukum Islam berlaku bagi penganutnya di zaman itu, dan juga hukum agama lain berlaku bagi pemeluknya. Pemberlakuan teori ini mendapat respon yang baik bagi masyarakat Indonesia, karena merasa diperhatikan oleh kaum penjajah Belanda. Dengan adanya teori *Receptio in Complexu*, maka para penganut agama dalam menjalankan ajarannya tidak ragu-ragu lagi.

Terkait dengan teori *Receptio in Complexu* itu, ada upaya untuk menentang pemberlakuannya, maka muncul teori lain. Teori yang menentang teori *Receptio in Complexu* adalah teori *Receptie*. Teori *Receptie* adalah teori yang mengatakan bahwa hukum Islam

---

<sup>62</sup>H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, h. 23.

itu tidak mesti otomatis berlaku bagi pemeluknya. Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam berlaku bagi pemeluknya apabila sudah diakui dan diterima oleh masyarakat adat serta sudah legal menjadi hukum adat bagi masyarakatnya. Teori *Receptie* ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli hukum adat Indonesia bernama Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje. Cornelis van Vollenhoven dinamakan sebagai ahli hukum adat Indonesia karena ia peletak pertama tentang hukum adat di Indonesia, sekaligus digelar sebagai peletak dasar pembuat sistem hukum adat di Indonesia.<sup>63</sup> Dengan berlakunya teori *Receptie* ini, maka hukum Islam tidak lagi diberlakukan berdasarkan ajaran agama Islam, tetapi hukum Islam dapat diberlakukan bila telah mendapat legitimasi dari hukum adat. Hukum adat lebih tinggi kedudukannya daripada hukum Islam pada waktu teori *Receptie* berlaku. Umat Islam merasa tertekan oleh pengaruh yang dibawa oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje dalam teorinya *Receptie*.

Pengaruh penjajah sangat menentukan aturan yang berlaku di suatu tempat atau wilayah. Siapa yang berkuasa, teorinyalah yang diberlakukan. Hukum pun diberlakukan tergantung pada pembuat kebijakan dan aturan. Meskipun teori itu baik tetapi tidak dikehendaki oleh penguasa dalam hal ini penjajah, maka otomatis teori itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan hukum. Teori *Receptie* ini sebenarnya tidak mendapat simpatik dari masyarakat Islam di Indonesia. Karena teori *Receptie* dianggap meremehkan hukum Islam, maka para pemimpin Islam bangkit dan menantang teori *Receptie* tersebut, sehingga muncul teori *Receptie Exit* (teori yang menantang teori *Receptie*-nya Snouck). Perlawanan umat Islam semakin gencar menentang yang mensyaratkan berlakunya hukum Islam dengan mengikuti hukum adat, artinya hukum Islam berlaku setelah mendapat legitimasi dari hukum adat. Maka pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*).

---

<sup>63</sup>H. Muchsin, h. 24.

Piagam Jakarta lahir setelah panitia kecil yang disebut panitia sembilan mencapai kesepakatan untuk mengkompromikan antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Panitia sembilan itu terdiri atas delapan orang di antaranya beragama Islam dan satu orang beragama Kristen. Mereka adalah: Soekarno, Muhammad Hatta, A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoedjoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.<sup>64</sup> Perbedaan yang menonjol dari sembilan orang tersebut adalah pemikiran dari nasionalis Islam sekuler, nasionalis Kristen sekuler, dan nasionalis Islam.

Perimbangan antara pemikiran Islam dan sekuler adalah empat berbanding lima (4:5). Empat orang yang berpikiran muslim murni dan lima orang yang berpikiran mencampurkan antara agama dan sekuler. Pemikiran yang bernuansa agama dan sekuler selalu diperdebatkan. Kesembilan orang tersebut adalah wakil rakyat Indonesia yang representatif dalam pengambilan keputusan tentang kepentingan bangsa Indonesia. Mereka meliputi nasionalis Islam, nasionalis Islam sekuler, dan nasionalis Kristen sekuler, yaitu:<sup>65</sup>

#### Nasionalis Islam:

1. Abikoesno Tjokrosoedjoso (tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia).
2. Abdul Kahar Muzakkir (pemimpin Muhammadiyah).
3. Haji Agus Salim (pendiri Partai Penyardar).
4. Abdul Wahid Hasjim (tokoh Nahdatul Ulama).

#### Nasionalis Islam sekuler:

1. Soekarno (Presiden Republik Indonesia).
2. Mohammad Hatta (Wakil Presiden Republik Indonesia).

---

<sup>64</sup>H. Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*: "Dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959" (Cet. I; Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB Kerjasama dengan Lembaga Studi Islam Bandung, 1401 H – 1981 M), h. 26.

<sup>65</sup>H. Endang Syaifuddin Anshari, h. 39.

3. Ahmad Soebardjo (dari Partai Masyumi).

4. Muhammad Yamin (tokoh nasional).

Nasionalis Kristen sekuler: A. A. Maramis.

Adanya kelompok-kelompok nasionalis tersebut, maka dalam Piagam Jakarta adalah menguatkan posisi hukum Islam dalam hukum nasional dengan kalimat yang bernuansa islami yaitu “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

## 2) Teori *Receptio A Contrario* dan Teori Eksistensi

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia semakin kuat setelah teori *Receptie*-nya Snouck dibantah dan tidak diberlakukan lagi yang menghasilkan teori *Receptie Exit*. Selain teori *Receptie Exit* yang menguatkan posisi hukum Islam di Indonesia, muncul lagi teori *Receptio A Contrario*. Teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*, yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum adat dapat berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pemberlakuan teori *Receptio A Contrario* ini, semakin meyakinkan umat Islam dalam menjalankan hukum Islam. Teori ini tetap menghargai dan tidak melarang memberlakukan hukum adat, dengan syarat hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam tatanan hukum nasional perlu diketahui bahwa produk hukum di Indonesia yang paling mempengaruhinya adalah hukum Islam. Karena itu, muncul teori *Eksistensi* yang menegaskan bahwa ada hukum Islam dalam hukum nasional.<sup>66</sup> Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum, menghendaki berkembangannya kehidupan umat beragama dan peraturan hukum agama dalam tatanan kehidupan hukum nasional.

Menurut teori Friederich Julius dan Hazairin Tahir Azhary bernama teori “Lingkaran Konsentris” mengemukakan bahwa

---

<sup>66</sup>H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, h. 25.

betapa eratnya hubungan antara agama, hukum, dan negara.<sup>67</sup> Teori ini menghendaki agama, hukum, dan negara tidak dapat dipisahkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai dasar negara Pancasila. Negara Pancasila melindungi kebebasan beragama yang pluralis, juga menghendaki memasukkan ajaran agama dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendapat Ichtijanto, dalam hukum nasional yang berdasar Pancasila berlaku hukum agama dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni menyangkut keyakinan agama, ibadah agama, dan hukum agama.<sup>68</sup> Hal ini membuktikan bahwa hukum agama telah lama hidup dan berkembang dalam hukum nasional di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum agama merupakan sumber ajaran pokok yang merupakan bagian integral terhadap hukum nasional. Hukum agama (hukum Islam) dan hukum nasional mempunyai hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi yang paling nampak adalah bahwa hukum Islam telah lama ada dalam hukum nasional (masuk dalam teori *Eksistensi*). Teori *Eksistensi* merupakan kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Receptio A Contrario* yang lebih mempertegas eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional.

Teori *Eksistensi* ini menjadikan hukum Islam semakin eksis ke dalam tata hukum nasional di Indonesia. Hukum Islam mempunyai andil dalam mewujudkan tatanan hukum nasional, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Salah satu inti dari teori *Eksistensi* adalah menjadi filter bagi hukum nasional, sebab dalam teori ini mengharuskan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional yang tak dapat dipisahkan dengan produk hukum lainnya.

---

<sup>67</sup>Ichtijanto SA, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: PP-IKAHA, 1994), h. 258.

<sup>68</sup>Ichtijanto SA, h. 258.

Konsistensinya teori eksistensi terhadap pemberlakuan hukum Islam, maka eksistensi dan adanya hukum Islam dalam hukum nasional meliputi empat bentuk:<sup>69</sup>

*Pertama: ada*, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.

*Kedua: ada*, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.

*Ketiga: ada*, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

*Keempat: ada*, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Keberadaan teori eksistensi ini dapat memperkaya khasanah hukum nasional dalam praktik dan teori pemberlakuan hukum terutama pengembangan materi hukum nasional di Indonesia. Hukum agama atau hukum Islam dan hukum nasional merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Demikian pula dengan sumber hukum lainnya, yakni hukum adat dan hukum Barat.

## **B. Produk Hukum Nasional dalam KHI**

Kehadiran Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang disingkat KHI telah menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam dan terkhusus lagi dalam lingkungan Peradilan Agama sejak KHI lahir pada tanggal 10 Juni 1991 dengan terbitnya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain inpres juga kepmen (sekarang permen), yakni berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Keputusan menteri ini tertanggal 22 juli 1991 oleh Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A. Adanya inpres ini, materi hukum Islam terlihat dan jelas dalam

---

<sup>69</sup>Ichtijanto SA, h. 258.

melakukan proses peradilan di Pengadilan Agama.<sup>70</sup> Inpres ini merupakan hasil produk hukum umat Islam yang dijadikan sebagai pegangan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia secara keperdataan pada lembaga Peradilan Agama.

Istilah kompilasi dapat diartikan secara sederhana sebagai kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun. Kompilasi Hukum Islam berarti pengumpulan atau penghimpunan hukum Islam. Untuk lebih memperjelas pengertian KHI, maka dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dijelaskan bahwa pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah: rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan, dan himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.<sup>71</sup> Kompilasi ini juga merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang mempunyai ilmu dalam bidang hukum Islam yang cukup memadai.

Pendapat hukum yang dimaksudkan adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta pendapat dari berbagai mazhab. Banyaknya pendapat atau mazhab di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan hukum Islam tidak beragam pula. Dengan adanya KHI yang dijadikan sebagai produk hukum, maka masyarakat Islam khususnya dalam lembaga Peradilan Agama mempunyai materi hukum yang satu, yakni Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut sebagai produk hukum nasional, sebab dalam KHI tercantum berbagai materi hukum yang merupakan kebutuhan masyarakat secara nasional. Misalnya, hal perkawinan tidak dapat disepelekan karena dalam perkawinan dan kelanjutannya melahirkan perbuatan-perbuatan hukum yang tentunya harus diatur secara nasional yang tidak

---

<sup>70</sup>Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 1991), h. 5.

<sup>71</sup>Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 968.



bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini merupakan hukum dasar tertulis tertinggi di Negara Republik Indonesia. Juga UUD 1945 disebut sebagai landasan konstitusional dari segala produk hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, pemberlakuan peraturan perundang-undangan dikenal dan berpedoman kepada hukum dasar, terutama hukum dasar tertulis. Hukum dasar yang berlaku, di samping hukum dasar yang tertulis juga berlaku hukum dasar yang tidak tertulis yang disebut dengan istilah konvensi.

Menurut *Kamus Hukum*, konvensi atau konpensi (*conventie*) berarti perjanjian internasional,<sup>72</sup> tetapi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya.<sup>73</sup> Pengertian inilah yang dimaksudkan oleh penulis bahwa hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi) yang merupakan acuan untuk digunakan KHI sebagai sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apatah lagi KHI diperkuat oleh Kepmen (sekarang Permen) yang merupakan bagian dari hierarki perundang-undangan. Hal ini dijadikan dasar untuk menjadi dasar konstitusional dan merupakan sinyal peraturan dalam hukum tidak tertulis terhadap tata hukum nasional.

Sebagai hukum dasar tertulis, pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan acuan dasar hukum adanya hukum tidak tertulis. Pasal tersebut berbunyi: “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”<sup>74</sup> Pasal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>72</sup>J.C.T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum* (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 31.

<sup>73</sup>Departemen Pendidikan Nasional (kini Kemendikbudristek), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 592.

<sup>74</sup>Republik Indonesia, *Amandemen Keempat UUD 1945 Tahun 2002 Pasal II Aturan Peralihan*.

keberadaan tata hukum di Indonesia meliputi empat produk hukum, yaitu: (1) hukum produk legislatif kolonial, (2) hukum adat, (3) hukum Islam, dan (4) hukum produk legislatif nasional.<sup>75</sup> Keempat produk hukum tersebut merupakan hasil konfigurasi dari aspirasi kebutuhan hukum masyarakat atau hasil dari terjemahan normatif hukum yang kemudian terformulasi secara fenomenologi atau disebut dengan istilah hukum positif.

Analisis hukum Islam dalam penerapannya di Indonesia, Prof. Dr. Rahmat Djatnika (ahli hukum Islam kontemporer Indonesia dan mantan Rektor IAIN Sunan Gunung Jati Bandung), mengemukakan bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam implementasi kehidupan masyarakat, mengalami penyesuaian dengan budaya Indonesia. Adanya penyesuaian tersebut, hasilnya terkadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negara-negara Islam lainnya.<sup>76</sup> Perbedaan dalam penerapan hukum Islam di setiap negara yang melaksanakan hukum Islam, menunjukkan bahwa betapa terbukanya hukum Islam untuk dikembangkan, terutama dalam pengembangan materi hukum Islam di Indonesia.

Upaya penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bahasan masalah berfungsinya hukum Islam dalam masyarakat Indonesia yang tercakup dalam sosiologi hukum Islam di Indonesia.<sup>77</sup> Adanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan membuka peluang bagi lembaga Peradilan Agama untuk lebih mengembangkan materi hukumnya. Sehingga dalam penerapan hukum Islam di Indonesia juga membuka tabir dalam mengimplementasikannya.

Terkait sistem hukum efektif jika ditaati atau dipatuhi yang didasari dengan kesadaran hukum, masyarakat muslim tentunya sadar dan taat terhadap hukum yang diberlakukan. Kesadaran hukum menyangkut faktor-faktor ketentuan hukum tertentu yaitu

---

<sup>75</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 58.

<sup>76</sup>Abdul Aziz Dahlan, h. 968.

<sup>77</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I ; Bandung : Rosda Karya, 1977), h. 27.

diketahui, dipahami dan ditaati, jadi menyangkut *legal conscuisness*, warga masyarakat akan menaati hukum bila diketahui, dipahami, dihargai manfaatnya.<sup>78</sup> Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila telah menyadari bahwa suatu peraturan itu dikatakan baik apabila telah diketahui/mengerti terutama dilaksanakan dengan baik dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum Islam dapat berfungsi dalam masyarakat jika telah melalui proses kelembagaan hukum Islam, agar menjadi bagian dari suatu lembaga sosial. Pelembagaan merupakan suatu proses di mana norma-norma hukum Islam dapat diketahui, dipahami, dinilai, dihargai, dijiwai dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat, sehingga menjadi budaya dalam masyarakat. Manusia akan menghargai hukum Islam kalau dijamin kemaslahatan hidupnya di dunia dan di akhirat.<sup>79</sup> Kalau kepatuhan terhadap hukum telah baik maka hal itu merupakan bagian dari ciri masyarakat yang sadar hukum.

Proses penerapan selanjutnya adalah metode *taqnin* (dilembagakan melalui undang-undang) bagi aturan-aturan hukum yang diperlukan. Dalam hal ini hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh penguasa, jadi hukum diartikan sebagai suatu jenis *social control* dan *social engineering* yang ditetapkan oleh penguasa. Dalam melaksanakan kedua proses sosialisasi tersebut, program penyuluhan merupakan langkah yang mendasar dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam. Penyuluhan dan sosialisasi hukum merupakan jenis bantuan hukum yang bersifat preventif dan termasuk dalam bentuk pendidikan non formal. Dengan tujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, menghargai, dan menaati hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum meningkat dan tercipta masyarakat sadar hukum (kadarkum). Untuk memahami dan melaksanakan hukum Islam secara sadar dan benar tentunya

---

<sup>78</sup>Ditbinpera Depag RI., *Mimbar Hukum*, No, 1 Tahun 1990, al-Hikmah, Jakarta, h. 206.

<sup>79</sup>Ditbinpera Depag RI., 206.

masyarakat disadarkan dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan hingga tuntas, dan tidak dipahami hukum tersebut secara tekstualnya saja tetapi juga harus dipahami secara kontekstualnya.

Tujuan penyuluhan dan sosialisasi hukum adalah supaya masyarakat memahami Kompilasi Hukum Islam, sehingga hukum Islam melembaga dan menjiwai masyarakat Indonesia. Di samping itu, masyarakat juga akan taat dan patuh terhadap hukum Islam dan mampu memperlihatkan nilai-nilai hukum Islam yang aktual dan membumi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi masyarakat.

Penyuluhan hukum tersebut diakui dan diterapkan dalam masyarakat dengan dasar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1989 tentang Penyuluhan Hukum, menetapkan bahwa tujuan penyuluhan hukum sebagai berikut: *pertama*, menjadikan masyarakat paham hukum dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai orang perorang. *Kedua*, membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum secara sukarela tanpa dorongan atau paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajiban sebagai mana yang ditentukan oleh hukum. Pada dasarnya, tujuan pokok penyuluhan hukum adalah mengusahakan agar warga masyarakat mematuhi hukum dengan cara melakukan kegiatan agar masyarakat memahami hukum serta menghayati manfaatnya. Dengan demikian masyarakat akan menjadikannya sebagai suatu kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Untuk memahami dengan baik dan benar, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menyukkseskan penyuluhan hukum, yakni: materi hukum, penyuluh hukum, dan metode penyuluh hukum.

#### 1) Materi hukum

Materi yang disuguhkan harus memenuhi tiga aspek, yakni aspek kognitif (pikiran), aspek apektif (perasaan), dan aspek

konotif (kecenderungan). Jadi materi-materi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketiga unsur tersebut dalam menerapkan ke dalam masyarakat. Karena itu, Kompilasi Hukum Islam harus disuguhkan secara menarik sehingga bisa membawa masyarakat mematuhi hukum, dan sanksi moral (akhirat) perlu ditonjolkan. Materi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi 3 (tiga) aspek hukum, yakni hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Kalau diteliti secara mendalam, maka materi hukum yang terkandung dalam hukum perkawinan tersebut meliputi berbagai proses dalam perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>80</sup> Pengertian tersebut mempunyai makna paling tidak tiga hal, yaitu perjanjian antara pihak peng-*ijab* dan pihak peng-*qabul* atau pihak isteri dan pihak suami. Makna lainnya merupakan perintah Allah dan sekaligus diyakini sebagai perbuatan ibadah.

Proses penerapan materi perkawinan tersebut dapat dilakukan beberapa tahapan sebelum dan sesudah melangsungkan akad nikah yaitu peminangan, wali hakim, akad nikah, mahar, taklik talak, harta kekayaan, pemeliharaan anak, perwalian, khuluk, dan mut'ah.<sup>81</sup> Materi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan hukum perkawinan yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam. Berikut ini penulis menguraikan dalam rangkaian hukum perkawinan.

Tahap yang pertama dilakukan adalah peminangan yang merupakan upaya melakukan perijodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Peminangan ini biasanya dilakukan atau diberi kepercayaan kepada orang-orang yang dituakan dan mempunyai pengalaman.

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan

---

<sup>80</sup>Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, bab II, pasal 2.

<sup>81</sup> Abdul Gani Abdullah, h. 78.

kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam praktik masyarakat wali hakim ini biasanya dilaksanakan oleh PPN (pegawai pencatat nikah) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Tetapi yang lebih umum dilaksanakan adalah Imam Desa atau Imam Kelurahan. Namun sekarang hal ini dilaksanakan oleh pejabat yang bernama penghulu.

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali, dan kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi. Yang menjadi masalah adalah jika ijab-kaumul tidak dilaksanakan dalam satu majelis, dan atau mempelai laki-laki diwakili untuk menerima kabul. Menurut penulis hal ini dapat dilakukan karena sekarang dapat ditunjang oleh alat teknologi yang semakin canggih. Suatu hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa hal tersebut terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Mahar adalah pemberian dari seorang calon mempelai laki-laki kepada seorang calon mempelai perempuan, baik berbentuk uang, barang atau lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Bentuk mahar ini biasa telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dijadikan sebagai mahar atau maskawin. Mahar ini sangat bervariasi tergantung kebiasaan dalam masyarakat di mana pihak perempuan untuk dapat menerimanya.

Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah terjadinya ijab-kaumul yang merupakan janji talak kepada isteri jika terjadi pada masa yang akan datang. Perjanjian tersebut biasanya dibacakan di hadapan orang banyak untuk didengarkan, sehingga hal tersebut merupakan bagian dari ikrar bagi seorang suami untuk menggauli isterinya dengan baik berdasarkan syari'at Islam.

Harta kekayaan dalam perkawinan yang biasa disebut dengan *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendirian maupun bersama antara suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama. Harta bersama ini biasa disebut dengan harta gono-gini. Hal ini tanpa dipersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Harta goni-gini

tersebut tidak diatur dalam fikih mawaris, oleh karenanya merupakan hasil ijtihad dari ulama atau tim penyusun Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Pemeliharaan anak atau biasa disebut dengan *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, merawat, dan mendidik anak sampai dewasa dan atau anak tersebut telah mampu untuk hidup mandiri. Dengan demikian kewajiban orang tua telah lepas jika anak tersebut telah dewasa (untuk laki-laki sampai selesai pendidikan/putus sekolah tapi sudah dewasa/kawin, dan untuk anak perempuan hingga ia sudah kawin).

Perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan dan bertindak sesuatu perbuatan hukum, sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, dan atau orang tua anak tersebut tidak mampu dan atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Perwalian ini sangat penting, karena begitu banyak anak yang terlantar yang tidak mendapatkan pengasuhan secara wajar, sehingga anak tersebut tidak memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana mestinya. Kalau unsur ini diabaikan, berarti masyarakat atau orang yang mestinya berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, berarti ia juga mengabaikan hukum Islam. Mengabaikan hukum Islam berarti melecehkan syari'at Islam, dan melecehkan syari'at Islam berarti berpaling terhadap Allah dan rasul-Nya melalui ulama fikih.

Khuluk ialah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *'iwaḍ* kepada suaminya serta disetujui oleh suami. Perceraian semacam ini dalam pengadilan disebut cerai gugat. Sebaliknya, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda, uang, dan atau lainnya. Oleh karena itu, jika suami yang mengajukan gugatan ke pengadilan disebut cerai talak. Uraian-uraian tersebut merupakan ketentuan umum dalam materi hukum perkawinan.

## 2) Penyuluh Hukum

Usaha dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam dengan sukses, seorang penyuluh harus memberikan yang terbaik dan

sebagai panutan, tidak tampil hanya karena mengharapkan sesuatu, akan tetapi harus menjiwai dan memahami segala yang disampaikan kepada masyarakat. Seorang penyuluh hukum berpengaruh di tengah masyarakat jika ia mampu menyampaikan materi hukum dan agama dengan baik dan benar.

Pendapat Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., adalah dua hal yang berpengaruh pada ketertiban dan atau keguncangan interaksi sosial yaitu hukum dan agama.<sup>82</sup> Untuk menuntun interaksi sosial sehingga mampu menghindarkan dampak negatif bagi kehidupan manusia, maka setiap penyuluh hukum mampu memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut tidak terlepas dari pengetahuan di bidang hukum dan agama yang harus bekerja sama secara kumulatif, sehingga pola pikir masyarakat terarah dengan jelas. Kalau ingin untuk menjadi penyuluh hukum terutama penyuluh hukum Islam, paling tidak ia harus banyak bersentuhan dengan masyarakat dan mengetahui medan masyarakat yang dihadapinya. Sebab terkadang komunitas masyarakat ada yang fanatik agama berdasarkan kebiasaannya dan ada bersifat moderat. Kedua kelompok masyarakat tersebut, penyuluh harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Sehingga dengan demikian materi hukum untuk disampaikan kepada masyarakat yang bersangkutan tidak terlepas dari proses interaksi sosial. Kalau sudah interaksi sosial berjalan dengan koridor hukum dan agama, maka dengan mudah masyarakat dapat memahami dan melaksanakannya dengan baik pula.

Usaha untuk mengetahui masyarakat pada tingkat kesadaran hukum dan kesadaran agama, maka komunitas masyarakat tersebut dilihat dari aspek pendidikannya. Kalau aspek pendidikannya maju, kelompok masyarakat tersebut mudah untuk menerima informasi, apatah lagi kalau informasi tersebut berkenaan dengan kebutuhan dalam masyarakatnya.

### 3) Metode Penyuluhan

---

<sup>82</sup>Abdul Gani Abdullah, h. 13.



Penyuluhan hukum merupakan proses komunikasi, metode penyuluhan adalah suatu rangkaian antara pendekatan, teknik dan sarana penyuluhan hukum. Dalam menyosialisasikan Kompilasi Hukum Islam ketiga unsur tersebut, mutlak diperhatikan, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan budaya daerah yang menjadi tujuan penyuluhan hukum tersebut.

Prospek penerapan Kompilasi Hukum Islam akan semakin menuntut perhatian yang ekstra serius, sebab pengetahuan masyarakat semakin meningkat, perubahan kondisi dan situasi pun semakin mengalami perubahan dari hari ke hari. Kesiapan para penyuluh dalam membahasakan Kompilasi Hukum Islam ke dalam masyarakat harus siap.

Tantangan dan kendala berupa ketidaksiapan masyarakat menerima produk fikih Indonesia ini, mampu diatasi sebab harapan dan peluang yang dapat memperlancar penerapannya. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah digali dari nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Perkembangan hukum yang beraneka ragam dan hidup dalam masyarakat Indonesia, menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam lahir dari masyarakat dan dikemas dengan prinsip hukum yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia sebagai fikih kontemporer.<sup>83</sup> Fikih kontemporer tersebut tidak menutup kemungkinan akan lahir materi hukum Islam yang diformulasikan dalam bentuk hukum lainnya. Tetapi yang jelas, dengan adanya undang-undang baru yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka semakin luaslah wilayah pengembangan kompetensi Peradilan Agama di Indonesia.

---

<sup>83</sup>Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung : Mizan, 1994), h. 5.

### C. Pengembangan Kompetensi Peradilan Agama

Sebelum membahas lebih jauh tentang pengembangan kompetensi lembaga Peradilan Agama, terlebih dahulu mengenal dan mengerti apa arti lembaga tersebut (peradilan dan pengadilan). Pengertian peradilan dan pengadilan terkadang disamakan, demikian halnya Peradilan Agama dan Pengadilan Agama.

Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum.<sup>84</sup> Jadi peradilan menyangkut tentang kasus dan materi hukumnya, sedangkan pengadilan menyangkut organisasi atau lembaga yang menyelesaikan kasus tersebut termasuk struktur organisasinya.

Peradilan merupakan suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan yang diatur dalam suatu peraturan hukum acara. Sedangkan pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara. Dengan demikian peradilan tidak bisa terlepas dari hukum acara, dan pengadilan selalu terletak dalam bidang hukum tata negara.

Menyangkut pengertian Peradilan Agama dan Pengadilan Agama juga selalu disamakan. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam.<sup>85</sup> Sedangkan Pengadilan Agama dirumuskan sebagai sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya di bawah lingkungan Departemen Agama (kini di bawah Mahkamah Agung) dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam.<sup>86</sup> Pengadilan Agama biasa disebut dengan *Mahkamah Syari'ah* yang berarti pengadilan yang menyelesaikan perselisihan hukum agama. Dengan menyatunya lembaga-lembaga peradilan di bawah

---

<sup>84</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 3.

<sup>85</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 1 ayat 1.*

<sup>86</sup> Cik Hasan Bisri, h. 3.

Mahkamah Agung, maka secara struktural dan finansial telah sama dengan peradilan lainnya.

Kompetensi Peradilan Agama dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama umumnya mencakup perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah; serta perwakafan dan sedekah. Namun dalam pengembangannya dapat meliputi berbagai materi dalam perekonomian Islam. Kompetensi Peradilan Agama mulanya hanya menyangkut hukum keluarga saja, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Revisi/Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama), maka wilayah kompetensi Peradilan Agama semakin luas, karena termasuk dalam bidang ekonomi syari'ah. Materi hukum Islam tersebut telah meluas, mulai dari hukum perkawinan hingga perkara ekonomi syari'ah.

#### 1) Materi Hukum Perkawinan

Perkawinan sering disinonimkan dengan pernikahan. Kawin atau nikah dalam bahasa berarti berhimpun atau *wata'*, dan menurut *syara'* berarti suatu aqad yang membolehkan seorang pria dan seorang wanita bergaul bebas (*wata'*).<sup>87</sup> Dalam upacara pesta, biasa disebut upacara perkawinan, tetapi dalam aqad disebut akad nikah. Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>88</sup>. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>89</sup> Ditinjau dari sejarah perkembangan umat

---

<sup>87</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu al-Sunnah dan Negara-negara Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h. 73.

<sup>88</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

<sup>89</sup>Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Buku I, Bab II, pasal 2.

manusia, pengertian perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh), dan tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketenteraman jiwa atau batin.<sup>90</sup> Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Terkait dengan berbagai pengertian perkawinan tersebut, dijumpai paling tidak ada tiga unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur sosial, unsur hukum, dan unsur agama. Unsur sosial dalam perkawinan adalah bermanfaat untuk memperjelas status sosial, menjaga dan memelihara kaum perempuan yang umumnya bersifat lemah. Unsur hukum dalam perkawinan bermanfaat untuk memelihara keturunan dan mempertinggi kedudukan sosial. Mengenai unsur agama dalam perkawinan bermanfaat untuk membentuk dan menghindari manusia dari pergaulan bebas sehingga terhindar dari perbuatan asusila dan kutukan perbuatan dosa. Tanpa unsur agama, maka unsur sosial dan hukum tidak berguna, karena agama dapat menjaga ketenteraman lahir dan batin.

Salah satu materi hukum Islam yang telah menyatu dalam hukum nasional di Indonesia adalah menyangkut tentang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diuraikan dalam bab dan pasal berikut:

## **Bab I Dasar Perkawinan**

### **Pasal 1**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **Pasal 2**

---

<sup>90</sup>Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. II; Jakarta PT Tintamas, 1983), h. 25.

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

### **Pasal 5**

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

## **Bab II Syarat-syarat Perkawinan**

### **Pasal 6**

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih

hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

#### **Pasal 8**

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemanakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

**Pasal 9**

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

**Pasal 10**

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

**Pasal 11**

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

**Pasal 12**

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.



### **Bab III Pencegahan Perkawinan**

#### **Pasal 13**

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### **Pasal 14**

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

#### **Pasal 15**

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

#### **Pasal 17**

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana

perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

### **Pasal 18**

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

### **Pasal 19**

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

### **Pasal 20**

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

### **Pasal 21**

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilaksanakan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

## **Bab IV Batalnya Perkawinan**

### **Pasal 22**

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan.

### **Pasal 23**

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

**Pasal 24**

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

**Pasal 25**

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

**Pasal 26**

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

**Pasal 27**

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

#### **Pasal 28**

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
  - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Bab V Perjanjian Perkawinan**

#### **Pasal 29**

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

## **Bab VI Hak Dan Kewajiban Suami-Isteri**

### **Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

### **Pasal 31**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

### **Pasal 32**

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

### **Pasal 34**

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## **Bab VII Harta Benda dalam Perkawinan**

### **Pasal 35**

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### **Pasal 36**

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

### **Pasal 37**

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

## **Bab VIII Putusnya Perkawinan serta Akibatnya**

### **Pasal 38**

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

### **Pasal 39**

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

### **Pasal 40**

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

### **Pasal 41**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut



pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## **Bab IX Kedudukan Anak**

### **Pasal 42**

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

### **Pasal 43**

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 44**

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

## **Bab X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak**

### **Pasal 45**

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat

berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### **Pasal 46**

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### **Pasal 47**

- (1) Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

#### **Pasal 48**

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### **Pasal 49**

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

- b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

## **Bab XI Perwakilan**

### **Pasal 50**

- (1) Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

### **Pasal 51**

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian

yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

#### **Pasal 52**

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

#### **Pasal 53**

- (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

#### **Pasal 54**

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

### **Bab XII Ketentuan-ketentuan Lain**

#### **Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul Anak**

#### **Pasal 55**

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang

bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua Perkawinan di Luar Indonesia**

### **Pasal 56**

- (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

## **Bagian Ketiga Perkawinan Campuran**

### **Pasal 57**

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

### **Pasal 58**

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

**Pasal 59**

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

**Pasal 60**

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

### **Pasal 61**

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

### **Pasal 62**

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

## **Bagian Keempat Pengadilan**

### **Pasal 63**

- (1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
  - a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
  - b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.
- (2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

### **Bab XIII Ketentuan Peralihan**

#### **Pasal 64**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

#### **Pasal 65**

- (1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
  - a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
  - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
  - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

### **Bab XIV Ketentuan Penutup**

#### **Pasal 66**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen **Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74**,



Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 67**

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini disahkan dan diundangkan di Jakarta, pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto. Undang-undang ini juga dicatat dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

### **2) Materi hukum kewarisan, wasiat, dan hibah**

#### **a. Hukum Kewarisan**

Secara umum kewarisan merupakan peralihan harta benda atau harta kekayaan berupa *tirkah* dari pewaris kepada ahli waris dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Pewaris merupakan orang yang telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris dengan tidak terhalang oleh hukum untuk menerima warisan. Adapun *tirkah* adalah harta bersih yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Bersih yang dimaksud adalah bersih dari wasiat dan utang si pewaris.

Pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris

dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>91</sup> Dalam pengertian hukum kewarisan tersebut ada tiga inti yang merupakan syarat mutlak, yaitu adanya ilmu tentang kewarisan, adanya harta warisan, dan adanya pewaris dan ahli waris yang tidak terhalang oleh hukum yang berlaku.

Gagasan reaktualisasi hukum Islam yang dilontarkan oleh Munawir Sjadzali, bermula ketika ia melihat kondisi sosial masyarakat muslim Indonesia yang melaksanakan di luar teks ayat-ayat al-Qur'an. Gagasan ini dilemparkan kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan forum resmi sejak tahun 1985, sehingga mendapat reaksi pro-kontra yang cukup keras dan tegas, terutama dari kalangan ulama.

Munawir Sjadzali dan pembaru lainnya mengingatkan agar dalam menguraikan gagasan tentang reaktualisasi jangan gegabah, terutama yang menyangkut kepastian hukum, misalnya kasus kewarisan 2:1 (dua banding satu) dijadikan 1:1 (satu banding satu). Gagasan inilah yang menggemparkan di berbagai kalangan, baik kalangan akademisi maupun kalangan praktisi, termasuk masyarakat secara luas yang mempunyai kepekaan terhadap hukum Islam.

Dalam pembagian harta warisan 2:1 [QS. al-Nisa (4): 11] adalah:

... لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ ﴿١١﴾ ...

<sup>91</sup>Republik Indonesia, *Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Bab I, pasal 171.

<sup>92</sup>Terjemahnya: ...bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan... Penafsiran ayat tersebut adalah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Eidisi baru revisi terjemah (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 11. Untuk jelasnya, terjemahnya sebagai berikut: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[\*]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[\*\*], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai

Ayat tersebut menerangkan bahwa bagian seorang laki-laki lebih besar dua kali lipat dari bagian seorang perempuan. Ketentuan tersebut telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, masyarakat yang daerahnya terkenal kuat Islamnya atau tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini diketahui setelah ia menjadi Menteri Agama atas laporan para hakim. Dalam kasus kewarisan di Pengadilan Agama, para hakim memberi fatwa kepada para ahli waris dengan ketentuan hukum faraid, pembagiannya 2:1. Akan tetapi para ahli waris yang muslim tersebut lebih memilih Pengadilan Negeri untuk meminta agar diberlakukan sistem pembagian yang rata. Dengan demikian fatwa hakim agama tersebut diabaikan walaupun fatwa yang dilontarkan oleh hakim itu bersumber dari teks ayat al-Qur'an.

Suatu hal yang mendapat perhatian khusus, bahwa orang yang enggan menerima fatwa hakim agama (Pengadilan Agama) dan lebih memilih Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya orang awam, melainkan orang yang cukup menguasai ilmu keislaman, termasuk tokoh-tokoh organisasi Islam.<sup>93</sup> Mayoritas dari mereka menghendaki pembagian secara merata, karena hal itulah yang mereka anggap lebih bersifat adil.

Menurut Dr. H. Satria Effendi M. Zein, gagasan reaktualisasi ajaran Islam yang Munawir Sjadzali lontarkan memang sempat membuat para ulama dan peminat hukum Islam menjadi ekstra repot. Karena gagasan tersebut merupakan prinsip dalam keyakinan umat Islam. Oleh karenanya, para pencinta hukum

---

*anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [\*] Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34). Sedangkan [\*\*] Lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.*

<sup>93</sup>Munawir Sjadzali, h. 88.

Islam harus mengkaji secara serius masalah fikih dan usul fikih sebagai metodologinya,<sup>94</sup> termasuk pembagian warisan yang menyamakan bagian laki-laki dan perempuan.

Hukum kewarisan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebut dengan istilah buku II yang berisi tentang pasal-pasal dan ayat-ayat kewarisan. Materi hukum kewarisan Islam dalam aturan perundang-undangan di Indonesia disahkan dan diundangkan tahun 1991.<sup>95</sup> Aturan tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

## Bab I Ketentuan Umum

### Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

---

<sup>94</sup>Satria Effendi M. Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Cet. I; Jakarta: Kerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 292.

<sup>95</sup>Lihat Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *KHI* Buku II.

- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

## **Bab II Ahli Waris**

### **Pasal 172**

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

### **Pasal 173**

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

#### **Pasal 174**

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - i. golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - ii. golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :  
duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

#### **Pasal 175**

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
  - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
  - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
  - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

### **Bab III Besarnya Bahagian**

#### **Pasal 176**

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

#### **Pasal 177**

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. \*

#### **Pasal 178**

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

#### **Pasal 179**

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

#### **Pasal 180**

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

#### **Pasal 181**

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

**Pasal 182**

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

**Pasal 183**

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

**Pasal 184**

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

**Pasal 185**

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

**Pasal 186**

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.



### **Pasal 187**

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
  - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
  - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

### **Pasal 188**

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

### **Pasal 189**

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka

lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

#### **Pasal 190**

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

#### **Pasal 191**

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

### **Bab IV Aul dan Rad**

#### **Pasal 192**

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

#### **Pasal 193**

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

Masalah warisan, Munawir Sjadzali mempunyai pengalaman pribadi. Sebelum ia melaksanakan gagasannya, terlebih dahulu meminta nasihat ulama terkemuka. Walaupun tidak mendapat

jawaban yang pasti dari ulama tersebut, namun ulama itu memberitahukan apa yang ia alami sendiri. Mendengar jawaban tersebut, ia termenung sebentar, lalu bertanya: “apakah dari segi keyakinan Islam kebijaksanaan tersebut tidak lebih berbahaya”.<sup>96</sup> Menurut Munawir Sjadzali, membagi rata harta kekayaan kepada putra dan putri selagi masih hidup dianggap sebagai hibah, dan mempunyai keraguan akan keadilan hukum faraid (hukum kewarisan). Sebab kalau seseorang mempunyai keyakinan akan adanya keadilan dalam hukum kewarisan, tidak perlu dilakukan pembagian sebagai hibah. Tetapi kenyataan yang dialaminya adalah sebagai bukti, bahwa sudah banyak masyarakat Islam melaksanakan pembagian harta kekayaan kepada kerabatnya yang dianggap sebagai hibah.

b. Wasiat

Mengenai wasiat ada dua pengertian, yaitu wasiat dan wasiat wajib. Wasiat dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>97</sup> Tetapi secara umum pengertian wasiat itu meliputi materi dan non materi. Wasiat yang meliputi materi adalah seperti yang disebutkan di atas, dan wasiat yang berupa non materi adalah pesan-pesan seseorang ketika dalam keadaan sakit atau sehat untuk seseorang agar berbuat lebih baik dari sebelumnya ketika ia meninggal dunia. Mengenai wasiat wajib adalah bagian yang diberikan kepada ahli waris yang mahjub hirman (terhalang) atau orang lain yang berjasa kepada si pewaris yang dilakukan oleh hakim dalam sidang majelis berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas. Untuk kejelasan dalam wasiat terdapat pada buku II KHI sebagai berikut:

---

<sup>96</sup>Munawir Sjadzali, h. 89.

<sup>97</sup>Republik Indonesia, *Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Bab II, pasal 171 (f).

## **Bab V Wasiat**

### **Pasal 194**

- (1) Orang yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

### **Pasal 195**

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

### **Pasal 196**

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

### **Pasal 197**

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
  - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
  - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
  - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
  - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
  - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

### **Pasal 198**

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

**Pasal 199**

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

**Pasal 200**

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

**Pasal 201**

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

**Pasal 202**

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

**Pasal 203**

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang

membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

#### **Pasal 204**

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

#### **Pasal 205**

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

#### **Pasal 206**

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

**Pasal 207**

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

**Pasal 208**

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

**Pasal 209**

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

**c. Hibah**

Pengertian hibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>98</sup> Hibah dapat dilakukan oleh orang yang telah berusia 21 tahun. Harta yang dapat dihibahkan maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta benda penghibah kepada orang lain atau kepada lembaga di hadapan minimal dua orang saksi yang bersyarat menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Ada hal yang istimewa yang berlaku khusus bagi orang tua. Secara umum hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Kemudian, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai harta warisan.

---

<sup>98</sup>KHI, pasal 171 (g).



## **Bab VI Hibah**

### **Pasal 210**

- (1) Orang yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

### **Pasal 211**

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

### **Pasal 212**

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

### **Pasal 213**

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

### **Pasal 214**

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. Ketentuan-ketentuan tentang hukum perkawinan di Indonesia termuat dalam undang-undang perkawinan secara lengkap dan telah direvisi dengan perubahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan undang-undang perkawinan ini antara lain perubahannya adalah terkait usia perkawinan bagi seorang perempuan, yakni dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

### 3) Materi Hukum perwakafan dan sedekah

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>99</sup> Dalam pengembangan materi hukum Islam, maka wakaf diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya. Juga dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut hukum Islam.

Perwakafan juga telah diakui secara yuridis formal sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut dapat dirinci dalam bab dan pasal-pasal, yaitu:

## **Bab I Ketentuan Umum**

### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

---

<sup>99</sup>KHI, buku II, bab I, pasal 215 (1).

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh Wakif .
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

## **Bab II Dasar-dasar Wakaf**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 2**

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah.

#### **Pasal 3**

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan dan Fungsi Wakaf**

#### **Pasal 4**

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

**Pasal 5**

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

**Bagian Ketiga****Unsur Wakaf****Pasal 6**

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

**Bagian Keempat****Wakif****Pasal 7**

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

**Pasal 8**

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
  - a. dewasa;
  - b. berakal sehat;

- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;  
dan
  - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

## **Bagian Kelima**

### **Nazhir**

#### **Pasal 9**

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

#### **Pasal 10**

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan

- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
  - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau
  - a. keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; dan
  - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan
  - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

## **Pasal 11**

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Keenam**

### **Harta Benda Wakaf**

#### **Pasal 15**

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

#### **Pasal 16**

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
  - a. benda tidak bergerak; dan
  - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. uang;
  - b. logam mulia;
  - c. surat berharga;
  - d. kendaraan;
  - e. hak atas kekayaan intelektual;
  - f. hak sewa; dan
  - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketujuh**

### **Ikrar Wakaf**

#### **Pasal 17**

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.



- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

### **Pasal 18**

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

### **Pasail 19**

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

### **Pasal 20**

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

### **Pasal 21**

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf .
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas Wakif;
  - b. nama dan identitas Nazhir;
  - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
  - d. peruntukan harta benda wakaf;
  - e. jangka waktu wakaf .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kedelapan**

### **Peruntukan Harta Benda Wakaf**

#### **Pasal 22**

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf .
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf .

## **Bagian Kesembilan**

### **Wakaf dengan Wasiat**

#### **Pasal 24**

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

### **Pasal 25**

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

### **Pasal 26**

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif .
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 27**

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang**

#### **Pasal 28**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syaria'ah yang ditunjuk oleh Menteri.

#### **Pasal 29**

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.

- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf .

### **Pasal 30**

Lembaga keuangan syari'ah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bab III Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf**

### **Pasal 32**

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

### **Pasal 33**

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

### **Pasal 34**

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

### **Pasal 35**

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

### **Pasal 36**

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

### **Pasal 37**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

### **Pasal 38**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

### **Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bab IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf**

### **Pasal 40**

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

**Pasal 41**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bab V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf****Pasal 42**

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

**Pasal 43**

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.

- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari'ah.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
  - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku;

- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

#### **Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bab VI Badan Wakaf Indonesia**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan dan Tugas**

#### **Pasal 47**

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

#### **Pasal 48**

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.



## **Pasal 49**

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
  - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
  - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
  - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
  - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

## **Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

## **Bagian Kedua**

### **Organisasi**

#### **Pasal 51**

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

#### **Pasal 52**

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

## **Bagian Ketiga**

### **Anggota**

#### **Pasal 53**

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

#### **Pasal 54**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani;
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
  - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syari'ah; dan
  - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

## **Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian**

### **Pasal 55**

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

### **Pasal 56**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### **Pasal 57**

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

### **Pasal 58**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

## **Bagian Kelima**

### **Pembiayaan**

#### **Pasal 59**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

## **Bagian Keenam**

### **Ketentuan Pelaksanaan**

#### **Pasal 60**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 61**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

## **Bab VII Penyelesaian Sengketa**

#### **Pasal 62**

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

## **Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan**

#### **Pasal 63**

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

**Pasal 64**

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

**Pasal 65**

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

**Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bab IX Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif****Bagian Pertama****Ketentuan Pidana****Pasal 67**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi Administratif**

#### **Pasal 68**

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkanya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syari'ah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syari'ah;
  - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bab X Ketentuan Peralihan**

### **Pasal 69**

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dtundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 70**

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

## **Bab XI Ketentuan Penutup**

### **Pasal 71**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Perwakafan ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Pasal-pasal yang memerlukan penjelasan dalam undang-undang tersebut dapat diuraikan berikut ini (lihat penjelasannya):

Pada penjelasan umum, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk



mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syari'ah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan

harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syari'ah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syari'ah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syari'ah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syari'ah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.
3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di

daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Adapun pasal-pasal yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut:

**Pasal 7;** yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

**Pasal 9;** yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

**Pasal 14;** (1) dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

**Pasal 16;** ayat (3) huruf g, yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syari'ah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

**Pasal 19;** penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

**Pasal 27;** yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama, yang dimaksud dengan pihak yang

berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

**Pasal 28;** yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syari'ah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syari'ah.

**Pasal 29;** ayat (1) pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah dimaksud.

**Pasal 32;** instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya, instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

**Pasal 34;** instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

**Pasal 36;** instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

**Pasal 38;** yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukannya data

tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

**Pasal 43;** ayat (2), pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syari'ah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syari'ah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 48;** pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

**Pasal 62;** ayat (2), yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syari'ah. Dalam hal badan arbitrase syari'ah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Penjelasan tersebut tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459 Tahun 2004.

Sedangkan sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat

dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.<sup>100</sup> Oleh karena itu sedekah merupakan perbuatan seseorang, memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu karena Allah semata. Sedekah merupakan tabungan ukhrawi bagi orang-orang yang meyakini, artinya banyak bersedekah berarti memperbanyak tabungan. Tabungan inilah yang menjadikan teman setia dalam perjalanan manusia yang beriman, baik dalam kehidupan duniawinya terlebih lagi dalam kehidupan ukhrawinya.

#### 4) Materi ekonomi syari'ah

Istilah ekonomi syari'ah dimaksudkan adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tidak termasuk ekonomi syari'ah sebagai bagian dari kewenangan Pengadilan Agama. Pada pasal 49 undang-undang ini dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan sedekah. Ekonomi syari'ah tidak termasuk dalam bidang perkara di Pengadilan Agama.

Terkait dengan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana pada (pasal 49) termuat dua bagian hukum merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan yaitu: (1) mengenai subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak maupun para pihak dalam suatu perkara; (2) mengenai hubungan hukumnya adalah bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; serta wakaf dan sedekah.<sup>101</sup> Perkara yang tidak termasuk dalam hubungan hukum

<sup>100</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, op. cit., h. 1008.

<sup>101</sup>H. Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar* (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), h. 74.

tersebut, maka tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Betapa banyak perkara yang menyangkut orang Islam yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, antara lain yang mengemuka adalah mengenai perbankan syari'ah dan semacamnya.

Sehubungan dengan banyaknya perkara dalam masyarakat Islam yang tidak masuk dalam wilayah Peradilan Agama, ada angin segar untuk lembaga Peradilan Agama. Dalam undang-undang atau Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikembangkan kewenangan Pengadilan Agama terutama pada pasal 49 undang-undang tersebut. Adapun yang merupakan konsep pengembangan kewenangan Pengadilan Agama (pasal 49), penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

Ekonomi syari'ah tersebut meliputi: bank syari'ah; lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah.

Awal berdirinya bank syari'ah dimulai sejak berdirinya Bank Pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB) pada sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1975 di Kota Jeddah - Arab Saudi.<sup>102</sup> Berdirinya IDB merupakan motivasi bagi negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syari'ah, termasuk negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, seperti Indonesia.

Kendala dalam lembaga peradilan yang merupakan kewenangan dalam menyelesaikan kasus adalah sengketa perdata pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Tetapi setelah diundangkannya Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disahkan menjadi undang-undang hasil

---

<sup>102</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 231.

amandemennya, maka orang Islam tidak lagi memilih pada kepastian hukum di Pengadilan Negeri tetapi harus berperkara di Pengadilan Agama.<sup>103</sup> Ketentuan yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama adalah memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 revisi undang-undang tersebut. Objek sengketa yang dimaksud adalah perdata bagi dan/atau antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan kapasitas hukum pada kewenangan Pengadilan Agama yang baru, akan menghindari upaya untuk memperlambat dan mengulur-ulur waktu dalam penyelesaian sengketa keperdataan orang Islam. Tidak lagi memilih pengadilan yang ia kehendaki atau pengadilan yang lebih menguntungkannya.

Perkara yang banyak terjadi dalam masyarakat Islam adalah menyangkut ekonomi syari'ah yang kini sedang menjamur di Indonesia. Ekonomi syari'ah telah berkembang dan banyak diminati oleh investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Materi ekonomi syari'ah ini merupakan objek yang baru bagi Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam materi ekonomi syari'ah tersebut meliputi berbagai istilah yang kesemuanya adalah bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan objek hukum lainnya seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Istilah-istilah ekonomi syari'ah tersebut adalah:<sup>104</sup>

1. Perbankan, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,

---

<sup>103</sup>Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pada penjelesannya tentang ketentuan umum alinea kedua: "Dalam undang-undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* yang menyatakan: **Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum ada yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus.**" Artinya mengenai kasus atau perkara kewarisan bagi umat Islam mutlak di Pengadilan Agama.

<sup>104</sup>Pengurus Pusat, *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, Kumpulan Tulisan Tentang Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PPHIM, 2006), h. 71.



- serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
  3. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  4. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  5. Simpanan, adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  6. Giro, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
  7. Deposito, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
  8. Sertifikat Deposito, adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah-tangankan.
  9. Tabungan, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

10. Surat Berharga, adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
11. Kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
12. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
13. Prinsip Syari'ah, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*); pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*); prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murbahah*); atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*); atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
14. Penitipan, adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
15. Wali Amanat, adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank

- umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
16. Nasabah, adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
  17. Nasabah Penyimpan, adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  18. Pihak Terafiliasi, adalah terdiri atas:
    - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
    - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
    - d. Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.
  19. Agunan, adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.
  20. Lembaga Penjamin Simpanan, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.
  21. Merger, adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.

22. Konsolidasi, adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi.
23. Akuisisi, adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank.
24. Rahasia Bank, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
25. Mudharabah, adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah dinisbahkan.
26. Sertifikasi Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA), adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah.
27. Bank Syari'ah, adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, termasuk unit usaha syari'ah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
28. Unit Usaha Syari'ah (UUS), adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syari'ah, dan atau unit syari'ah.
29. Unit Syari'ah, adalah satuan kerja khusus dari kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah dalam rangka persiapan perubahan menjadi kantor cabang syari'ah.

30. Aktiva Produktif, adalah penanaman dana bank syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia.
31. Pembiayaan, adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah bagi hasil.
32. *Mudharabah*, adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
33. *Musyarakah*, adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
34. Piutang, adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna* dan atau *ijarah*.
35. *Murabahah*, adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah.
36. *Salam*, adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
37. *Istishna*, adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan

- persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
38. *Ijarah*, adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
  39. *Qardh*, adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
  40. Surat Berharga Syari'ah, adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syari'ah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syari'ah, sertifikat reksadana syari'ah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.
  41. Penempatan, adalah penanaman dana bank syari'ah pada bank syari'ah lainnya dan atau bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syari'ah antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan wadiah, deposito berjangka dan atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi mudhrabah antar bank (setifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.
  42. Penyertaan Modal, adalah penanaman dana bank syari'ah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syari'ah yang berakibat bank syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah.
  43. Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan Syari'ah, adalah bank syari'ah bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syari'ah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna

usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

44. Penyertaan Modal Sementara, adalah penyertaan modal bank syari'ah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*counvertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.
45. Proyeksi Pendapatan (PP), adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima bank syari'ah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah.
46. Realisasi Pendapatan (RP), adalah pendapatan yang diterima bank syari'ah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan.
47. Transaksi Rekening Administratif, adalah komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip syaria'ah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *irrevocable letter of credit* (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, *stendby L/C* dan garansi lain berdasarkan prinsip syari'ah.
48. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), adalah sertifikat yang diterbitkan oleh bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan wadiah.
49. Wadiah, adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut.

Istilah-istilah ekonomi syari'ah tersebut merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan

prinsip syari'ah pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia, sekaligus merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diperkarakan bagi orang-orang Islam. Dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang-orang yang beragama Islam tidak lagi melakukan pilihan hukum pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) menyangkut perkara tertentu.<sup>105</sup> Apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai bukti bahwa perkembangan materi hukum Islam di bidang perkawinan telah mengalami perubahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang RI 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU RI 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini memiliki latar belakang sehubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah: "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian

---

<sup>105</sup>Perkara tertentu yang dimaksudkan dalam revisi undang-undang tersebut adalah menyangkut perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah (meliputi 11 bidang seperti yang telah disebutkan terdahulu).



jelas merupakan diskriminasi." Pertimbangan diskriminasi inilah menjadikan dasar perubahan undang-undang perkawinan tersebut. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Keluarga yang dimaksudkan adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Terkait dengan adanya amar putusannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Terjadinya perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau

dengan menaikkan batas minimal usia/umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Kemenkumham RI pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Adanya undang-undang perkawinan yang baru ini dinaikkannya batas usia yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Perubahan undang-undang perkawinan tersebut adalah atas pertimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-undang perkawinan yang baru tersebut mempunyai dasar hukum yaitu: *pertama*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20, dan pasal 28B. *Kedua*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada

pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin, hingga jenjang pendidikan terakhir.

Adanya perubahan/revisi undang-undang tersebut, maka pengembangan materi hukum Islam di Indonesia semakin luas dan kompleks, sehingga memerlukan sarjana-sarjana muslim yang andal dalam bidang ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional semakin kuat, dan para pencari keadilan dalam perkara tertentu bagi umat Islam tidak lagi seenaknya memilih kepastian hukum. Hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia bagaikan satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, dan hukum Islam tetap eksis dalam hukum nasional sepanjang zaman di Indonesia. Lahirnya revisi/perubahan kedua undang-undang tersebut, maka materi hukum Islam semakin luas dan berkembang termasuk peningkatan dan perpanjangan usia hakim dan panitranya. Demikian halnya terkait perkembangan dan penegakkan hukum Islam di Indonesia.

## BAB V

# P E N U T U P



**P**erkembangan dan pengembangan materi hukum Islam di Indonesia kini meliputi berbagai aspek, termasuk dalam pengembangan ekonomi syari'ah, berikut ini kesimpulan dan implikasinya.

### A. Kesimpulan

Istilah hukum Islam merupakan istilah yang dikembangkan dan dibakukan di Indonesia dan diberlakukan bagi masyarakat Islam. Hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam produk pemikiran hukum yaitu, fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Juga merupakan bagian produk sosiologi hukum sebagai kebiasaan hidup bermasyarakat. Pembaruan hukum Islam di Indonesia, melalui beberapa tahapan, mulai dari fase prakemerdekaan (fase kerajaan atau kesultanan dan zaman penjajahan) sampai masa pasca kemerdekaan dalam tiga masanya (orde lama, orde baru,

dan orde reformasi). Ketiga orde tersebut mempunyai perkembangan dan pergolakan dalam hukum Islam di Indonesia.

Pemberlakuan Hukum Islam pada masa prakemerdekaan (fase kerajaan atau kesultanan dan fase/zaman penjajahan) ialah umumnya dengan memakai teori *receptie* yakni hukum Islam baru boleh dijalankan bilamana telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat adat setempat yang ditaati oleh masyarakat tersebut. Pelaksanaan hukum Islam pada masa pascakemerdekaan, ditandai dengan orde lama sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai tahun 1966, dengan merujuk pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945, dan tujuh kata pada Piagam Jakarta (Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya) diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya hukum Islam diberlakukan bagi orang-orang Islam.

Periode orde baru, pelaksanaan hukum Islam mulai nampak (tahun 1966-1998), terutama dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang perubahannya, Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan undang-undang perubahannya, dan undang-undang lainnya serta kepres/inpres dan kepmen/permen yang terkait dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam di orde reformasi (tahun 1989-sekarang), pelaksanaan dan perkembangan hukum Islam semakin luas, yakni diperlihatkan dengan lahirnya undang-undang yang khusus berlaku bagi umat Islam, lahirnya otonomi khusus pelaksanaan syariat Islam (Aceh) dan partai-partai yang berazaskan Islam. Proses sosialisasi hukum Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan yang mendekati titik klimaks, walaupun dengan melalui perjuangan dan pengorbanan, baik dalam menangkal serangan dari luar maupun dari dalam negeri. Ora reformasi ini, hukum Islam mulai bergulir lagi dengan undang-undang yang bernuansa Islami seperti undang-undang tentang zakat, haji, termasuk revisi undang-undang Peradilan Agama, dan produk hukum Islam lainnya.

Perkembangan dan pengembangan materi hukum Islam di Indonesia menjadikannya hukum Islam sebagai sumber hukum nasional yang melahirkan teori *eksistensi* yang menyatakan bahwa ada hukum Islam dalam hukum nasional, yang mempunyai fungsi dan hasil dalam hukum nasional di Indonesia. Fungsinya ialah adanya sebagai sumber utama hukum nasional dan sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Sedangkan hasilnya ialah adanya sebagai bagian hukum integral dan adanya kemandirian yang diakui hukum nasional. Produk hukum dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai produk hukum nasional terutama pada pengembangan materi hukum Islam di Indonesia. Pengembangan kompetensi Peradilan Agama terkait materi hukum Islam, tidak hanya pada perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, perwakafan, dan sedekah, tetapi juga terhadap pengembangan materi hukum Islam yakni ekonomi syari'ah.

Ekonomi syari'ah yang dikembangkan meliputi perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah lainnya. Bagian-bagian dari ekonomi syari'ah tersebut menjadi wilayah hukum lembaga Peradilan Agama sekaligus menjadi kewenangan pada Pengadilan Agama dalam proses perkara tertentu bagi orang-orang Islam. Adanya perluasan wilayah kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang keperdataan Islam (ekonomi syari'ah). Karena itu pengembangan materi hukum Islam di Indonesia ke depan ternyata bukan hanya materi perkara tertentu seperti ekonomi syari'ah tetapi juga terbuka peluang materi hukum pidana Islam.

## **B. Implikasi**

Terbitnya buku ini dapat menghasilkan nuansa baru sekaligus melahirkan karya tulis ilmiah dalam pengembangan materi hukum Islam di Indonesia. Buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum termasuk masyarakat muslim lainnya, terutama mahasiswa Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sebagai penulis



menyadari akan keterbatasan, sehingga diharapkan kepada para pembaca untuk memberikan sumbangsinya dalam penyempunaan lebih lanjut, terutama menyangkut pengembangan materi hukum Islam di Indonesia ke depan pada pertumnuhan dan perkembangannya.

Sebagai bahan renungan atau buah pikiran, diharapkan pengembangan materi hukum Islam ke depan lebih luas terutama yang menyangkut hukum pidana Islam yang diperjuangkan/digodok di lembaga legislatif, segera terwujud menjadi undang-undang sehingga menjadi sebuah produk hukum Islam yang baru di Indonesia sebagaimana produk hukum lainnya. Pengembangan materi hukum Islam di Indonesia adalah adanya figur yang dapat menyuarakan dan memperjuangkan di lembaga kenegaraan, baik lembaga legislatif maupun eksekutif dan yudikatif. Pemegang kendali di daerah, provinsi atau kabupaten/kota hendaknya orang-orang yang mampu memikul manah, baik amanah dari Allah maupun amanah dari manusia (masyarakat) itu sendiri.

Terbitnya buku ini semoga menjadikan referensi pada perguruan tinggi terutama pada penelitian yang terkait dengan materi hukum Islam di Indonesia. Akhirnya, dengan memohon riḍa Allah swt. semoga buku ini bermanfaat bagi para pembacanya, dan bagi penulis akan menjadi amal jariah kelak, insya Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abdurrahman, Dudung dkk. *Sejarah Peradaban Islam: dari Masa Klasik Hingga Modern*. Cet. I; Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Lesfi, 2003.

Ahmad, Amrullah dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Nabi Muhammad Saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam. Cet. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

———. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988.

Amirin, Tatang M. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Cet. IV; Jakarta: Rajawali, 1989.

Anderson, J.N.D. *Islamic Law in the Modern Word*. Diterjemahkan oleh Machnum Husein dengan Judul, *Hukum Islam di Dunia Modern*. Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.

Anshari, H. Endang Syaifuddin. *Wawasan Islam: Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*. Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

———, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. "Dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959." Cet. I; Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB Kerjasama dengan Lembaga Studi Islam Bandung, 1401 H – 1981 M.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Cet. I; Yogyakarta: Ekonisia UII, 2005.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Suatu Pengantar Umum*. Cet. I; Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

- A. Ubaidillah, et al. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Badjeber, Zain dan Abdul Rahman Saleh. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar*. Jakarta: Pustaka Amani, 1990.
- Basjir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Bowett Q.C.LL.D., D.W. *The Law of International Institutional*. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja dengan Judul, *Hukum Organisasi Internasional*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet. XIII; Jakarta: PT Gramedia, 1991.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 2, Cet. V; Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Dahlan, Zaini dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama RI, 1987.
- , *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu al-Sunnah dan Negara-negara Islam*. Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi baru revisi terjemah. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ditbinpera Depag RI., *Mimbar Hukum*, No, 1 Tahun 1990, al-Hikmah, Jakarta, h. 206.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. XX; Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Fauzan, Achmad. *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Edisi Revisi. Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Hafidhuddin, K.H. Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Harman, Benny K. *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1997.
- Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Surabaya: Karya Anda, 1994.
- Hisyam, Usamah, dkk., *SBY Sang Demokrat*. Jakarta: Dharmapena, 2004.
- Ichtijanto SA. *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Arullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: PP-IKAHA, 1994.
- Ja'far, Muhammad Anas Qasim. *Al-Huqūq al- Siyāsiyyah li al-Mar'ah fī al-Islām wa al-Fikr al-Tasyrī*. Diterjemahkan oleh Mujtaba Hamdi dengan Judul, Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan Sebuah Perspektif Islam. Cet. I; Jakarta: Penerbit Azan, 2001.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kartasapoetra, Rien G. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1988. Maududi, Maulana Abu A'la. *Human Right in Islam*. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja dengan Judul, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Katjasungkana, Nursyahbani dkk. *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum*. Cet. I; Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilmu Ushūl al-Fiqh* diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer dengan judul *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- . *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Cet. IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

- , *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*. Alih Bahasa Ahyar Aminuddin. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Cet. I; Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Lubis, H. Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jilid II. Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*. New Delhi: Academy of Law Religion, 1987.
- Mu'allim, Amir. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Cet. II; Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2001.
- Muchsin, H. *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: STIH Iblam, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Ditelaah dan Dikoreksi oleh K.H. Ali Ma'shum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progrssif, 1997.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1985.
- Permono, K.H. Sjechul Hadi. *Sumber-sumber Penggalan Zakat*. Cet. II; Jakarta: Pusta Firdaus, 1994.
- Praja, Juhana S. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Edisi Lengkap Bahasa Belanda - Indonesia - Inggris, Semarang: CV Aneka, 1977.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*. Cet. II; Karangasem-Laweyan-Solo: Era Intermedia, 1422 H/2001 M.
- Quthub, Sayyid. *Fî Zilâli al-Qur'ân* diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dengan judul *Tafsîr Fî Zilâl al-Qur'ân: Dilengkapi dengan Takhrij Hadis dan Indeks Tematik*. Jilid 2 Juz 3 dan 4 Cet. I; Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. IV; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Redaksi Sinar Grafika. *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

- . *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- . *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- . *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- . *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- . *Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- . *Tap MPR No. IV/1999 Tentang GBHN 1999-2004 Bab II tentang Kondisi Umum*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- . *Amandemen Keempat UUD 1945 Tahun 2002*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. I; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Salman, Otje, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: CV Armico, 1984.
- As-Sayis, Syekh Muhammad Ali. *Târikh al-Fiqh al-Islâmî*. Diterjemahkan oleh Dedi Junaedi dengan Judul, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Edisi I, Cet. I; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Edisi Kedua, Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- . *Pengantar Hukum Islam*. Jilid II, Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- . *Pengantar Ilmu Fiqhi*. Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- . *Pedoman Zakat*. Edisi II. Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996.
- . *Hukum-hukum Fiqhi Islam*. Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*. Cet. II; Bandung: Mizan, 2001.
- Siddik, Haji Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. II; Jakarta: PT Tintamas, 1983.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Simorangkir, J.C.T. dkk. *Kamus Hukum*. Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

- Sjadzali, Munawir. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Cet. I; Jakarta: Kerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru Kesatu, Cet. V; Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- . *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XIV; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- . *Bahan Bacaan Perspektif Teoritis dalam Sosiologi Hukum*. Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- . *Mengenal Sosiologi Hukum*. Cet. IV; Bandung: Alumni, 1986.
- Starke, J.G. Starke. *Introduction to Internasional Law*. Diterjemahkan oleh Sumitro L.S. dan Lukas Ginting dengan Judul, *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kesembilan, Cet. I; Jakarta: PT Aksara Persada Indonesia, 1988.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Edisi Baru. Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. VI; Makassar: Alauddin Press University, 2020.
- Susanto, Noto. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Depag, 1963.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqhi*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tim Redaksi. “Seks dan Gender” dalam *Buletin Amal Hayati*. Edisi No. 04/Th.II/V/2002.
- Umar, Nasaruddin. *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Wahid, Sugira. “Seputar Gender”, *Makalah*. Disampaikan dalam Pelatihan Muballighat se-Indonesia Timur dalam Rangka Pemberdayaan Muballighat Menuju Proses Pembentukan Masyarakat Madani di Makassar tanggal 12 November 1999.
- Yafi, Ali. *Menggagas Fiqhi Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.

## BIOGRAFI PENULIS



**Supardin**, lahir di *Tana Luwu* (tepatnya di Batu Merah-Kota Malili, kini menjadi Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur), pada tanggal 2 Maret 1965 adalah alumni Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang pada bulan Mei 1991 Jurusan Peradilan Agama; lulusan Magister Hukum Islam (S2) pada UIN Alauddin Makassar pada bulan Mei 2006 Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam (Peradilan Agama); Doktor Hukum Islam (S3) pada UIN Alauddin Makassar pada bulan November 2013 Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam (Peradilan Agama). Kini sebagai dosen pembina mata kuliah fiqhi/fiqhi mawaris/hukum kewarisan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, juga mengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, dan sebagai dosen agama pada Akademi Kebidanan Pelamonia Kodam VII Wirabuana di Makassar. Beberapa karya telah diterbitkan antara lain: Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu: Studi Kasus (penelitian 1991); Konsep Siri dalam Lontara dan Realisasinya pada Masyarakat Gowa: Studi Kasus Kawin Lari(penelitian 1998); Peluang dan Tantangan Alumni Fakultas Syari'ah (majalah Al-Marhamah Kanwil Kemenag Sulsel 2003); Reaktualisasi Hukum Kewarisan Islam (jurnal 2003); Ilmu Jiwa Sosial (buku 2003); Tasbih dan Jala (buku 2004); Kewarisan Bilateral Beda Agama (jurnal 2004); Syari'ah dan Lingkungan (jurnal 2004); Hukum Islam dan Sistem Hukum Internasional (jurnal 2005); Islam dan Etos Kerja (buku 2006); Hadis-hadis Jender (jurnal, 2010); Konfigurasi Hukum Islam di Indonesia (buku Maret 2011); Materi Hukum Islam (buku 2011); Lembaga Peradilan Agama & Penyatuan Atap (buku Desember 2012); Menelusuri Perkembangan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah di Indonesia (penelitian 2013); Analisis Sosiologi Hukum dalam Realitas Fikih Sosial (jurnal 2014); Fikih Peradilan Agama di



Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu (buku 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020); Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (jurnal 2017); Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer (jurnal 2018); Fikih Etimologi *Inna wa Akhawātuha* dalam Memahami Ayat-ayat Hukum (jurnal 2019); *The Challenges of Islamic Law in the Industrial Revolution* = Realitas Fikih Muamalah di Era Revolusi Industri (jurnal 2020); *The Contestation of Values in Character Education: Political Interest and School Burden* (jurnal Internasional 2020); dan lain-lain. Penulis juga aktif di sejumlah organisasi intra maupun ekstra kampus, antara lain: Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang 1988-1989; Instruktur dan Penceramah ke-100 di HMI Cabang Ujung Pandang (1987-2003); Wakil Ketua KAHMI IAIN Alauddin Makassar dan Gowa (2004-2005); Pendiri dan Formatur IPMIL (Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu) Koordinator IAIN Alauddin Ujung Pandang 1989; Penatar P4 1997; Pendiri KKLK (Kerukunan Keluarga Luwu Raya) Cabang Kabupaten Gowa 2000; Pengurus KKLK (Kerukunan Keluarga Luwu Timur), Sekretaris KPN Al-Munawarah IAIN Alauddin 1999-2004; Komite MAN 2 Model Makassar 2011-2006; Wakil Sekjen Badan Pengurus Pusat Ikatan Alumni IAIN/UIN Alauddin Makassar 2005 – sekarang; Sekjen Seni Bela Diri Ikhlas Indonesia 2000-sekarang; Tim Hisab Rukyat UIN Alauddin Makassar 1994-sekarang; Ketua KMA PBS UIN Alauddin Makassar 2002; Ketua Pembangunan Masjid MAN 2 Model Makassar 2006-2007; Pengurus Dewan Masjid Indonesia Sul-Sel 2010-2015; Pengurus PUI (Persatuan Umat Islam) Sul-Sel 2008-sekarang; Sekretaris MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah) Sul-Sel 2008-sekarang; Sekretaris Jurusan Perbandingan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassa 2001-2006; sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakutlas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (2008-2012); Wakil sekretaris Pengurus KPPSI Kota Makassar (2013) dan menjadi Wakil Sekjen KPPSI (2013-2016); Kepala Laboratorium Falak Faklutas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2014-2015); Ketua Bidang Dakwah Masjid Kampus II UIN Alauddin Makassar dan sebagai Dewan

Pembina Masjid Haji Jamaluddin Muhammad jalan Tun Abdul Razak II Hertasning Baru, Paopao Permai (2010-sekarang); Ketua Jurusan Peradilan Agama/Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan (kini menjadi Prodi Hukum Keluarga Islam); Plt. Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2016-2019); Ketua Umum Kerukunan Keluarga Luwu Raya Cabang Kabupaten Gowa (2018-2023); Kepala Pusat Peradaban Islam Sulawesi Selatan LP2M Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kepala Pusat Kebersihan UIN Alauddin Makassar (2019-sekarang); Dewan Pembina Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya Koordinator Perguruan Tinggi UIN Alauddin Makassar (2020-sekarang); dan lain-lain.

# INDEKS

## A

A. A. Maramis, 55, 56  
Abad, 161  
Abdul Gani Abdullah, 61, 64, 67  
Abdul Kahar Muzakkir, 55  
Abdul Wahhab Khallaf, 11, 17, 21  
Abdul Wahid Hasjim, 55  
Abdurrahman Wahid, 50  
Abikoesno Tjokrosoedjoso, 55  
Aceh, 8, 31, 36, 41, 46, 51, 53, 54, 154  
Achmad Soebardjo, 55  
adat, 6, 10, 11, 32, 34, 43, 44, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 154  
administratif, 130, 144  
Agraria, 29  
agrobisnis, 136  
Ahli, 92, 95, 96, 99  
Akad nikah, 65  
akademisi, 24, 53, 93  
akhirat, 17, 62, 64  
akseptasi, 146  
aksi, 53  
Aktiva, 30, 31, 143  
akuntan publik, 129, 142  
Allah, 1, 14, 17, 18, 19, 21, 32, 46, 50, 51, 64, 66, 70, 93, 137, 156  
Al-Munawwir, 16, 17, 19, 160  
al-Qur'an, 1, 12, 17, 21, 22, 59, 93, 94, 163  
amaliyah, 18  
amanah, 1, 112, 126, 156  
Amandemen, 3, 27, 60, 70, 161, 162  
Amangkurat I, 42  
amar, 148, 151  
Amerika, 5  
Amien Rais, 50  
Amir Mu'alim, 11  
Amir Syarifuddin, 17, 19, 20  
Anak, 84, 85, 86, 87, 96, 98, 99  
Anak angkat, 96  
andal, 43, 44, 152

Anzilotti, 32  
aparatus, 43, 44  
apartemen, 136  
apektif, 63  
aqidah, 18  
Arab, 16, 17, 19, 41, 138, 160  
Arab Saudi, 138  
Asal usul, 87  
Asing, 88  
aspirasi, 50, 61  
asumsi, 51  
asuransi syari'ah, 8, 9, 136, 138, 155  
Aul, 101  
Ayah, 98  
Ayat, 94

## B

B.J. Habibie, 50  
badan eksekutif, 25  
Badan hukum, 113  
Bagdad, 5, 40  
bahasa, 1, 16, 17, 19, 21, 23, 70  
Bali, 41  
Bandung, 32, 48, 55, 61, 68, 157, 158, 160, 161, 162, 163  
Bang Ucu, 51  
Bangsa, 3, 36, 50  
Bank, 30, 31, 138, 140, 143, 146, 158  
Bank Indonesia, 30, 31, 146  
Bank Perkreditan Rakyat, 140  
bank syari'ah, 8, 138, 143, 144, 145, 146  
Banten, 41, 52  
Barang, 76, 79, 90  
Barat, 6, 11, 34, 39, 46, 48, 58  
beasiswa, 117  
Belanda, 5, 8, 38, 42, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 161  
Bersih, 92  
budaya, 1, 25, 39, 61, 62, 68  
Buku, 8, 9, 13, 22, 70, 93, 95, 102, 155

Bumi, 60, 160, 162  
burgelijk Wetboek, 91

## C

Christian Snouck Hurgronje, 54  
Cik Hasan Bisri, 23, 48, 49, 61, 69  
Cina, 5  
Cirebon, 41, 52  
convertible bonds, 145  
Cornelis van Vollenhoven, 54  
counvertible bonds, 146

## D

Daerah, 28, 31, 41, 124  
dalil, 19  
damai, 3, 22, 23, 38, 51  
Dampak positif, 37  
dana, 8, 138, 140, 141, 143, 144,  
145, 146, 155  
Dasar Negara, 45, 55, 60, 131,  
150, 157  
Daud Beureuh, 46  
debt to equity swap, 146  
Demokrat, 51, 159  
demonstrasi, 53  
Deposito, 140  
dewan komisaris, 142  
direksi, 142  
diskriminasi, 147, 150, 151  
divide et impera, 43  
doktrin, 17, 21, 43  
Duda, 98  
dunia, 1, 2, 5, 6, 11, 15, 17, 39, 44,  
62, 73, 92, 95, 96, 102, 103,  
104, 105, 106, 118, 122  
Dzawil furud, 101

## E

efek, 17, 145  
Ekonomi, 8, 30, 137, 138, 139,  
155, 157, 160, 161, 162  
ekonomi syari'ah, 3, 8, 9, 10, 13,  
15, 26, 34, 54, 70, 126, 133,  
137, 138, 139, 146, 147, 152,  
153, 155

Ekonomi syari'ah, 8, 137, 138, 139,  
155  
eksis, 57, 152  
Endang Syaifuddin Anshari, 36, 41,  
55  
endosemen, 146  
equity options, 145, 146

## F

fakir miskin, 117, 136  
fase, 8, 9, 36, 41, 52, 53, 153, 154  
Fase, 54  
Fatwa, 23, 24, 162  
Fatwa ulama, 24  
Februari, 3, 24, 27  
figur, 156  
fiqh, 17, 19, 24  
Friederich Julius, 56  
fundamental, 51  
Fungsional, 31

## G

garansi, 146  
Giro, 140  
Gowa, 42  
Gugatan, 83  
Gus Dur, 51

## H

H. Moh. Rifa'i, 23  
Hadis, 161  
Haji, 30, 55, 71, 95, 162  
Haji Agus Salim, 55  
hak, 35, 63, 64, 80, 81, 82, 85, 91,  
92, 95, 96, 99, 101, 103, 108,  
114, 115, 120, 129, 133, 134,  
141, 147, 149, 150, 151, 152,  
159, 160  
Hak, 29, 79, 81, 84, 159, 160, 161  
hak sipil, 147, 150, 151  
Hakim, 28, 73, 99, 103  
haram, 17  
Harta, 65, 82, 96, 103, 105, 107,  
108, 110, 111, 114, 117, 118,  
119, 120, 121

Harta bawaan, 82  
 Harta benda, 82, 103, 108, 114, 118, 120, 121  
 harta kekayaan, 64, 92, 102  
 harta peninggalan, 92, 95, 97, 100  
 Harta peninggalan, 96, 107  
 Hazairin Tahir Azhary, 56  
 Hibah, 96, 107, 108  
 hidup, 2, 5, 17, 32, 35, 36, 44, 48, 52, 57, 66, 68, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 91, 96, 102, 107, 140, 150, 153, 154  
 Hijriah, 23, 35, 51  
 hubungan horizontal, 1  
 hubungan vertikal, 1  
 hukum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, **24**, 25, 26, 28, **31**, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 122, 123, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 162  
 hukum adat, 6, 11, 34, 43, 48, 54, 56, 58, 61  
 Hukum adat, 54  
 Hukum kewarisan, 95  
 Hukum perwakafan, 109  
 hukum syara, 17, 19, 21  
 Hukum syara, 17  
 Hukum syara', 17  
 hukum terapan, 3, 20  
 Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia, 91

# I

IAIN Sunan Ampel Surabaya, 24  
 IAIN Sunan Gunung Jati, 61  
 Ibadah, 23, 30, 162  
 ibadah gairu maḥḍah, 22

Ibu, 98  
 Ichtijanto, 57, 58, 159  
 Ide, 24  
 ijab, 64, 65  
 Ijarah, 145  
 ijarah wa iqtina, 141  
 Ikrar, 109, 110, 111, 115, 116  
 Ikrar wakaf, 115, 116  
 ilmu, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 31, 32, 33, 50, 59, 93, 94  
 ilmu fiqhi, 18  
 ilmu pengetahuan terapan, 31  
 Implementasi, 43  
 Indonesia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 102, 108, 110, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163  
 Inggris, 5, 159, 161  
 Inpres, 14, 25, 49, 59, 64, 70, 93, 95, 102, 161  
 instansi, 22, 69, 87, 124, 135  
 Internasional, 158, 163  
 investasi, 136, 145  
 Investasi, 143  
 Islam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, **24**, 25, 26, 28, 29, **31**, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 90, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 107, 109, 112, 113, 116, 126, 137, 138, 139, 141, 147, 152, 153, 154,

155, 156, 157, 158, 159, 160,  
161, 162, 163  
Islam kontemporer, 61  
Islamic Development Bank, 138  
Islamisasi, 37  
istinbat, 19  
Istishna, 144  
Izin, 28, 29, 122

## J

Jakarta, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 17, 19, 20,  
21, 27, 31, 33, 35, 36, 39, 40,  
41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52,  
54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62,  
69, 70, 71, 92, 95, 131, 137,  
138, 139, 149, 154, 157, 158,  
159, 160, 161, 162, 163  
Janda, 98  
jasa bank, 142  
Jawa, 26, 27, 28, 41, 46, 47  
Jeddah, 138  
Jenderal, 42  
jenis kelamin, 1, 147, 151  
Jepang, 5, 8, 44  
Jerman, 5  
Juhaya S. Praja, 11  
jumhur fuqaha, 19  
Jurusan, 155

## K

K.N. Sofyan Hasan, 12  
kadarkum, 62  
Kahar Muzakkar, 46  
Kalimantan, 26, 41  
Kamus, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26,  
31, 60, 136, 159, 160, 161,  
162, 163  
Kartosuwiryo, 46  
Karya, 61, 159  
karyawan, 142  
Kawin, 70  
Keagamaan, 96  
kebenaran, 3, 51, 134  
Kedudukan anak, 84  
Kehakiman, 27, 36, 49, 63, 159  
keimanan, 14, 18

kekayaan intelektual, 115, 133  
Kekuasaan, 26, 27, 36, 49, 159  
Keluarga, 28, 81, 155  
Kemampuan, 2  
Kematian, 83  
Kemerdekaan, 13, 36, 44, 45  
kemitraan, 136  
kepala pemerintah, 25  
kepmen, 53, 58, 154  
Kepolisian, 31  
kepres, 53, 154  
Kerajaan Cirebon, 52  
Kesehatan, 30  
Kesultanan, 40  
kesusilaan, 18, 81  
Ketuhanan, 6, 14, 45, 52, 70, 71,  
154  
Keuangan, 133, 135, 145  
keuangan mikro syari'ah, 8, 9, 138  
Kewajiban, 28, 81, 84, 85, 97  
kewarisan, 8, 9, 12, 13, 15, 23, 26,  
48, 54, 64, 70, 92, 93, 94, 95,  
102, 137, 139, 155  
Kewarisan, 28, 92, 157, 163  
kewenangan, 4, 9, 10, 34, 54, 65,  
66, 68, 137, 138, 146, 155  
khalifah, 1  
Khalifah, 39  
Khulafaurrasyidun, 5, 39  
khuluk, 64  
Kisyāf Iṣṭilāhāt al-Funun, 18  
kitab, 17, 22, 23, 59, 134  
kitab fikih lengkap, 23  
kitab fikih tematis, 23  
kitab syari', 17  
kliring, 145  
kognitif, 63  
kompetensi, 51, 68, 69, 70, 155  
kompilasi, 59  
Kompilasi, 14, 24, 25, 28, 29, 49,  
51, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66,  
68, 70, 93, 95, 102, 107, 155,  
161  
komprehensif, 55  
komunikasi, 1, 68  
Komunis, 5, 46  
Konfigurasi, 159, 160  
Koninkelijk Besluit, 42  
konotif, 64

konsentrasi, 15  
 konstitusi, 6, 7, 8, 45, 54  
 Konstitusi, 35, 147, 148, 150, 151,  
 157, 159  
 Konsulat, 108  
 konsultan hukum, 142  
 kontradiksi, 51  
 Kredit, 141  
 Kristen, 36, 42, 55, 56, 91

## L

laki-laki, 1, 64, 65, 66, 93, 94, 93,  
 95, 97, 98, 99, 108  
 Landasan historis, 49  
 Landraad, 53  
 Laporan tahunan, 128  
 legal consicuisness, 62  
 legislatif, 25, 45, 47, 49, 52, 53, 61,  
 156  
 Lembaga, 26, 36, 55, 119, 133,  
 135, 142, 157, 159  
 lembaga keuangan syari'ah, 8, 118,  
 119, 130, 138, 155  
 lembaga peradilan, 8, 25, 34, 53,  
 69, 138  
 lembaga sosial, 33, 62  
 Lembaran Negara Republik  
 Indonesia, 92, 131, 136, 149,  
 150  
 likuidasi, 143  
 Literatur, 14  
 Literatur primer, 14  
 Literatur sekunder, 14  
 Lombok, 41  
 Londewijk Willem Christian van den  
 Berg, 53

## M

M. Quraish Shihab, 23  
 Madinah, 35  
 Madiun, 46  
 Madura, 26, 27, 28  
 mahar, 64, 65  
 Mahdah, 23, 161, 162  
 maḥḍah, 20, 22  
 Mahmud Syaltout, 18  
 Majelis, 124, 128

Makassar, 47, 163  
 Makhluk, 1  
 Maluku, 41  
 Manusia, 1, 62, 160, 161  
 Masa kebangkitan, 5, 39  
 Masehi, 11, 36, 51, 52  
 Masjid, 47  
 Masjid Istiqlal, 47  
 Masyarakat, 36, 48, 61, 62, 139,  
 158, 159, 163  
 Mataram, 41, 52  
 Materi, 9, 11, 12, 13, 34, 36, 63,  
 64, 70, 92, 95, 137, 139  
 materi hukum, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13,  
 14, 15, 25, 28, 31, 33, 34, 39,  
 40, 49, 51, 53, 54, 58, 59, 61,  
 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 109,  
 147, 152, 153, 155, 156  
 Materi hukum, 9, 13, 63, 64, 70,  
 92, 95  
 mediasi, 128, 136  
 mediator, 136  
 Mega, 51  
 Megawati Soekarnoputri, 51  
 Menteri, 24, 25, 28, 29, 30, 58, 63,  
 64, 94, 110, 114, 118, 119,  
 120, 121, 124, 127, 128, 129,  
 130, 134, 138  
 Metode, 13, 14, 68  
 metode ijtihad, 22  
 metode taqnin, 62  
 Minangkabau, 41  
 Modal, 145, 146  
 modal ventura, 145  
 Mohammad Daud Ali, 5, 39, 43, 44  
 mubah, 17  
 Muchsin, 51, 53, 54, 56, 160  
 Mudharabah, 143, 144  
 Muhammad Hatta, 55  
 Muhammad saw, 4, 5, 35  
 Muhammad Yamin, 55, 56  
 Muhammad Yusuf Kalla, 51  
 Muhammadiyah, 55, 160  
 mukallaf, 17, 21  
 Munawir Sjadzali, 24, 58, 93, 94,  
 95, 101, 102  
 Musabaqah Tilawatil Qur'an, 47  
 Muslim, 18  
 musuh, 43, 50, 106

Musyarakah, 144  
mutlak, 68, 93, 139

## N

nabi, 18  
Nabi, 4, 5, 18, 35, 39, 40, 93, 157  
Nanggroe Aceh Darussalam, 8, 31,  
36, 51, 54  
nasabah, 140, 142, 143, 144, 146  
Nasional, 2, 9, 17, 20, 21, 24, 26,  
30, 31, 32, 43, 55, 57, 58, 60,  
135, 157, 159  
Nasionalis, 55, 56, 157  
Nasionalis Kristen sekuler, 56  
nasionalis sekuler, 55  
Nazhir, 109, 110, 111, 112, 113,  
114, 116, 117, 119, 120, 121,  
122, 123, 124, 132, 133, 134  
Nazhir badan hukum, 122  
Negara, 3, 6, 7, 29, 35, 38, 45, 46,  
51, 55, 56, 57, 60, 70, 92, 110,  
123, 131, 136, 149, 150, 157,  
158, 159, 163  
Negara Kesatuan Republik  
Indonesia, 3, 7, 38, 51, 110,  
123, 131  
Nikah, 28  
Nilai, 11, 68  
Notaris, 103, 105, 106, 107  
Nusantara, 40

## O

Objek, 13, 139  
obligasi syari'ah, 8, 138, 145  
opsi saham, 145, 146  
Orang tua, 85  
Orde, 45, 47, 50, 163  
Orde baru, 47  
Orde lama, 45, 47  
orde penguasa tunggal, 52  
Ordonansi, 26  
Organisasi, 113, 125, 138, 158,  
163  
Otonomi, 31

## P

Pahlawan, 46  
Pancasila, 3, 36, 38, 45, 57  
parlemen, 25, 37  
Partai, 46, 55, 56  
Partai Penyardar, 55  
Partai Syarikat Islam Indonesia, 55  
Pasal, 6, 29, 60, 70, 71, 72, 73, 74,  
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,  
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,  
91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100,  
101, 103, 104, 105, 106, 107,  
108, 109, 110, 111, 112, 113,  
114, 115, 116, 117, 118, 119,  
120, 121, 122, 123, 124, 125,  
126, 127, 128, 129, 130, 131,  
134, 135, 136, 148, 150, 151  
pasar swalayan, 136  
pascakemerdekaan, 45, 53, 54,  
154  
pegadaian syari'ah, 8, 138, 155  
pejabat, 41, 51, 64, 74, 85, 87, 89,  
106, 110, 142  
Pelaku, 4  
Pembatalan perkawinan, 78  
pemberontak, 46, 50, 51  
pembiayaan syari'ah, 8  
Pembukaan Undang-Undang Dasar,  
13, 131  
pemegang saham, 142  
pemerintah, 11, 25, 26, 27, 32, 38,  
42, 43, 47, 51, 136  
Pemerintah, 27, 28, 29, 75, 84, 92,  
110, 114, 116, 119, 120, 121,  
123, 124, 127, 129, 130, 134,  
135  
peminangan, 64  
Pendidikan, 17, 21, 24, 30, 31, 32,  
60, 158, 159  
Pengadilan, 4, 10, 12, 25, 26, 27,  
34, 42, 53, 59, 68, 69, 72, 73,  
74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83,  
84, 85, 87, 89, 90, 91, 94, 95,  
96, 100, 101, 137, 138, 139,  
146, 155  
penghianat, 50, 51  
Pengusaha, 51  
Penjajahan, 42



penyuluh hukum, 63, 67  
 penyuluhan hukum, 63, 68  
 Perancis, 5  
 perang, 22, 23, 106  
 perasaan, 63  
 peraturan, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 17,  
 18, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 33,  
 38, 39, 43, 44, 56, 60, 62, 63,  
 69, 72, 75, 83, 91, 92, 113, 114,  
 115, 117, 121, 122, 126, 131,  
 132, 133, 134, 136, 142, 153  
 Peraturan, 2, 7, 8, 26, 27, 28, 29,  
 30, 31, 75, 84, 92, 114, 116,  
 119, 120, 121, 123, 129, 130  
 Perbankan, 30, 139, 143  
 perbuatan, 2, 4, 8, 17, 19, 21, 33,  
 54, 59, 64, 66, 71, 81, 82, 85,  
 109, 112, 113, 116, 126, 132,  
 136, 137, 146  
 Perceraian, 28, 66, 83  
 Perdata, 7, 18, 91, 158  
 perempuan, 1, 64, 65, 66, 71, 93,  
 94, 95, 97, 98, 99, 108  
 pergaulan, 18, 32, 71, 81  
 perikatan, 19  
 perikehidupan, 1, 2  
 perindustrian, 136  
 Periode, 5, 40, 154  
 Perjanjian, 65, 80, 81  
 perjodohan, 64  
 perjuangan, 13, 53, 51, 154  
 perkantoran, 136  
 Perkara, 137, 139, 147  
 perkataan, 19  
 perkawinan, 8, 9, 12, 13, 15, 23,  
 26, 43, 47, 48, 54, 59, 64, 65,  
 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,  
 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,  
 85, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 97,  
 99, 108, 137, 139, 147, 148,  
 149, 150, 151, 152, 155  
 Perkawinan, 28, 48, 49, 52, 70, 71,  
 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80,  
 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92,  
 108, 147, 148, 149, 150, 151,  
 152, 154, 158, 161, 162  
 Perkawinan campuran, 89, 90  
 permen, 26, 53, 58, 154  
 pertambangan, 136  
 pertokoan, 136  
 Perubahan, 4, 8, 14, 26, 27, 28, 29,  
 30, 34, 47, 70, 108, 120, 139,  
 147, 148, 149, 150, 151, 152,  
 161  
 perwakafan, 9, 12, 13, 15, 23, 26,  
 50, 54, 64, 70, 109, 110, 118,  
 123, 124, 126, 128, 131, 132,  
 134, 139, 155  
 Perwakafan, 28, 29, 109, 131  
 Perwakilan, 25, 48, 50, 86, 126  
 perwalian, 64  
 Pewaris, 92, 95  
 Piagam, 35, 45, 52, 54, 55, 56,  
 154, 157  
 Piagam Jakarta, 45, 52, 54, 55, 56,  
 154  
 piatu, 117  
 pidana, 2, 4, 9, 20, 22, 23, 34, 39,  
 50, 54, 123, 129, 130, 155, 156  
 Pidana, 129  
 pikiran, 50, 63, 156  
 pilar, 43, 44  
 Piutang, 144  
 politik, 23, 36, 37, 39, 43, 53, 147,  
 151  
 Portugis, 42  
 PPAIW, 110, 115, 116, 119, 120,  
 130, 134  
 prakemerdekaan, 38, 42, 52, 53,  
 153, 154  
 praktisi, 10, 24, 52, 53, 93  
 praktisi muslim, 52  
 Presiden, 24, 25, 28, 30, 31, 36,  
 38, 45, 47, 50, 55, 58, 92, 110,  
 126, 127, 131, 149  
 preventif, 62  
 Priesterrad, 53  
 proaktif, 134  
 Produk hukum, 155  
 profesional, 133, 155  
 proses sosial, 31, 47, 62  
 Provinsi, 8, 29, 31, 51, 123  
 pure science, 31  
 Pustaka, 3, 10, 17, 21, 48, 55, 60,  
 137, 157, 158, 159, 160, 162  
 Putra, 21, 93, 158, 162

## Q

qabul, 64  
Qanun, 31  
Qardh, 145

## R

Rad, 101  
rahmat, 14, 46, 50  
Rahmat, 61  
Rahmat Djatnika, 61  
raja, 25  
Rakyat, 25, 48, 50, 140  
rancangan undang-undang hukum pidana, 3, 20  
rasul, 18, 66  
Rasulullah saw, 5, 19  
reaktualisasi, 93, 94  
reasuransi syari'ah, 8, 138  
Receptio A Contrario, 52, 56, 57  
receptio in complex, 42  
Regeling op gemeng de Huwelijken, 92  
reksa dana syari'ah, 8, 138  
Rektor, 61  
Revisi, 27, 28, 70, 138, 159  
Revolusi, 46  
Rujuk, 28  
Rumah, 81  
Rusia, 5

## S

Saksi, 116  
Salam, 144  
Sanksi administratif, 130  
sarana kesehatan, 136  
sarjana, 152  
Satria Effendi M. Zein, 94, 95  
Sedekah, 137, 159  
Sejarah, 5, 10, 11, 38, 39, 40, 41, 55, 157, 160, 162  
sekuritas syari'ah, 8, 138  
Sengketa, 128  
Simpanan, 140, 142  
Sistem, 2, 6, 9, 11, 20, 30, 36, 37, 43, 57, 157, 158, 159  
Sistem hukum, 6

skim asuransi syari'ah, 136  
Snouck Hurgronje, 43, 54  
social control, 62  
social engineering, 62  
Soeharto, 24, 47, 92  
Soekarno, 38, 47, 51, 55  
Soerjono Soekanto, 31, 32, 33  
Sosial, 30, 68, 161, 163  
sosial budaya, 39  
**Sosiologi**, 31, 32, 33, 162, 163  
Sosiologi hukum, 31, 32  
Spesialisasi, 6  
Staatsblad, 26  
Status, 120  
strategi, 50  
struktur sosial, 31  
Sulawesi, 41, 46  
Sultan, 41, 52  
Sultan Malikul Zahir, 52  
Sumatera, 41  
Sumbawa, 41  
Sumber, 5, 51, 161  
sumber daya manusia, 54, 50  
Surat keterangan, 89  
Susilo Bambang Yudhoyono, 51, 131

## T

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, 10  
T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 19, 21  
Tabir, 157  
tabungan, 137, 140, 145  
Tabungan, 137, 140  
tabungan ukhrawi, 137  
tafṣīlī, 19  
taklik talak, 64  
taktik, 50  
Talak, 28  
Tallo, 42  
tanggung jawab, 51, 96  
taqir, 17, 21  
tauhid, 19  
Tentara Islam Indonesia, 46  
**Teori**, 31, 42, 44, 52, 53, 54, 56, 57, 157  
teori Eksistensi, 52, 56, 57  
teori Receptie Exit, 52, 54, 56, 57

teori Receptio A Contrario, 52, 56,  
57  
teori Receptio in Complexu, 52, 53  
Teoritis, 163  
the Jakarta Charter, 54  
Tokoh agama, 52  
Tuhan, 7, 18  
Tulisan, 139  
tumbuh, 11, 32, 36, 149, 150, 152

## U

Uang, 118, 119  
**Ulama**, 23, 55, 124, 128  
umat, 3, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 31,  
34, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46,  
47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 51,  
54, 56, 57, 59, 70, 95, 117, 139,  
152, 153, 154  
Undang-undang, 2, 3, 25, 69, 72,  
74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88,  
89, 90, 91, 92, 109, 133, 150  
unit usaha syari'ah, 143  
universal, 18, 19  
unregistered goods, 135  
uṣūl, 17, 21, **24**  
utang, 92, 118, 140, 145, 146

## V

Van Den Berg, 42

## W

Wadiah, 146  
wahyu, 7, 9, 22, 51, 153  
wajib, 7, 11, 17, 18, 32, 72, 82, 84,  
85, 86, 91, 102, 121, 127, 131,  
132  
Wakaf, 95, 109, 110, 111, 113,  
114, 115, 116, 117, 118, 119,  
120, 121, 122, 123, 124, 125,  
126, 127, 128, 129, 131, 132,  
133, 135, 136, 157, 162  
wakaf-khairi, 133  
Wakif, 109, 110, 111, 112, 114,  
115, 116, 117, 118, 119, 133,  
134, 135

Wakif badan hukum, 112  
Wakif organisasi, 112  
Wali, 28, 64, 86, 87, 141  
wali hakim, 64, 65  
Wali hakim, 64  
wali nikah, 64, 76, 79  
Warkum Sumitro, 12, 159  
wilayah, 25, 34, 40, 51, 54, 68, 70,  
78, 88, 133, 138, 155

## Y

Yang Maha Esa, 6, 14, 45, 52, 70,  
71, 154  
yatim, 117  
yatim piatu, 117  
Yatsrib, 35  
Yogyakarta, 18, 25, 41, 157, 158,  
160, 163  
**Yurisprudensi**, 24, 25, 163  
Yusdani, 11

## Z

Zakat, 30, 31, 157, 159, 161, 162  
zakat fitrah, 136  
Zaman, 53  
zaman klasik, 23  
zaman modern, 23

## S



Supardin, lahir di Tana Luwu (tepatnya di Batu Merah-Kota Malili, kini menjadi Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur), pada tanggal 2 Maret 1965 adalah alumni Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang pada bulan Mei 1991 Jurusan Peradilan Agama; lulusan Magister Hukum Islam (S2) pada UIN Alauddin Makassar pada bulan Mei 2006 Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam (Peradilan Agama); Doktor Hukum Islam (S3) pada UIN Alauddin

Makassar pada bulan November 2013 Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam (Peradilan Agama). Kini sebagai dosen pembina mata kuliah fiqhi/fiqhi mawaris/hukum kewarisan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, juga mengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, dan sebagai dosen agama pada Akademi Kebidanan Pelamonia Kodam VII Wirabuana di Makassar.

Buku ini membahas tentang hukum Islam di Indonesia dalam studi pengembangan materi termasuk perkara-perkara tertentu. Secara umum dijelaskan bahwa materinya memberi pengertian tentang gambaran pengembangan hukum Islam terutama materi hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia. Materi hukum Islam tersebut diwujudkan dalam suatu hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sejak fase kesultanan, zaman penjajahan, masa kemerdekaan, hingga era Reformasi saat ini. Pengembangan materi hukum Islam tidak saja menyangkut perkawinan, kewarisan, hibah, dan perwakafan, tetapi dikembangkan pada materi hukum lain seperti ekonomi syari'ah. Materi ekonomi syari'ah antara lain meliputi perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, dan lain-lain. Hal inilah menjadi kewenangan Peradilan Agama kini dan masa akan datang.



**Alamat:**

UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar  
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36  
Romangpolong, Samata,  
Kabupaten Gowa.

ISBN 978-602-328-385-9

